

LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali



TAHUN 2023

KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Timur, Siswodipuran, Boyolali 57311, Provinsi Jawa Tengah
Telp (0276) 321052 Fax (0276)325363, Email:inspektorat.boyolali@gmail.com
web:www.boyolalikab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Boyolali, 6 Maret 2024



Drs. GATOT MURDIYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199003 1 006

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kepemerintahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 dengan baik untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada perangkat daerah Kabupaten Boyolali dan semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Boyolali tahun 2023. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Daerah	1
1.3.1. Kondisi Geografis	1
1.3.2. Kondisi Demografi	2
1.3.3. Kewenangan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	2
1.3.4. Perangkat Daerah	4
1.4. Isu Strategis Daerah	7
1.5. Prioritas dan Arah Kebijakan	8
1.6. Sistematika Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026	10
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Pengukuran Kinerja	13
3.2. Analisa Pengukuran Kinerja	15
3.3. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan	6
Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.....	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.....	12
Tabel 3.1 Skala Ordinal Capaian Kinerja.....	14
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	14
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan 1	15
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1	15
Tabel 3.5 Capaian PDRB Setiap Sektor Tahun 2019-2023	16
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Tujuan 2	21
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2	21
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Tujuan 3.....	24
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3.....	25
Tabel 3.10 Capaian Komponen IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023.....	26
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4.....	29
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4.....	29
Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Tujuan 5	33
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5.....	33
Tabel 3.15 Capaian Komponen IDG Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023.....	34
Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Tujuan 6	38
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6.....	38
Tabel 3.18 Capaian Komponen Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali	39
Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Tujuan 7	42
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7	42
Tabel 3.21 Capaian Variabel IPPD Kabupaten Boyolali	43
Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Tujuan 8	48
Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8.....	48
Tabel 3.24 Capaian Komponen Perhitungan IKLH Kabupaten Boyolali	49
Tabel 3.25 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023.....	55
Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan Tahun 2023	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 – 2023.....	16
Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali 2019 - 2023	22
Grafik 3.3 Perkembangan IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2023	25
Grafik 3.4 Indeks Resiko Bencana 2019-2023	30
Grafik 3.5 Angka Konflik Sosial 2020-2023	31
Grafik 3.6 Indeks Pemberdayaan Perempuan 2019-2023	34
Grafik 3.7 Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017 - 2023	36
Grafik 3.8 Perkembangan Indeks Desa Membangun 2019-2023	37
Grafik 3.9 Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali 2019- 2023	39
Grafik 3.10 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020- 2023.....	43
Grafik 3.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019 - 2023.....	49
Grafik 3.12 Indeks <i>Smart City</i> Tahun 2019-2023.....	51

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang didalamnya telah memuat Indikator Kinerja Utama. Guna pelaksanaan rencana tahunan maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya, yang disusun berdasarkan RPJMD 2021-2026, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Dalam laporan ini memuat informasi hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang mendukung Visi dan Misi Bupati. Visi Bupati sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 adalah **“Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**, yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan sebanyak 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 12 (dua belas) IKU tersebut, maka capaian rata-rata sebesar **100.99%**, dengan kategori **sangat tinggi**. Hasil pengukuran terhadap IKU telah dilakukan analisa yang meliputi capaian kinerja 2023, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, progres pencapaian target akhir RPJMD, dan perbandingan dengan realisasi tertinggi secara nasional atau rata-rata nasional (jika ada), faktor pendukung keberhasilan, hambatan dan solusi serta program dan anggaran pendukung pencapaian IKU tersebut.

Hal utama yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah adanya upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara bersama (kolaboratif) antar Perangkat Daerah dan Instansi lainnya yaitu Pemerintah Desa dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali serta pihak swasta. Upaya tersebut diawali dengan pemberian bantuan sosial melalui gerakan satu data Boyolali, yang berbasis RT sebagai organisasi terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya dibentuk Tim “Tanggap Sosial” yang dilanjutkan dengan grup WhatsApp (WA) Tanggap Sosial yang membahas, menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat, termasuk didalamnya penanganan fakir miskin, orang sakit, lanjut usia, orang dengan kebutuhan khusus, orang dengan gangguan jiwa, dan permasalahan sosial lainnya. Atas upaya tersebut telah membawa hasil yang signifikan di Boyolali. Berdasarkan data Balai

Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan. Angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 10.62%, tahun 2022 sebesar 9.82% dan tahun 2023 sebesar 9.81%. Sedangkan menurut perhitungan satu data Boyolali pada tahun 2022 angka kemiskinan sebesar 6.96% dan tahun 2023 sebesar 6.68%, atau turun sebesar 0.28%.

Kabupaten Boyolali juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Pro investasi. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai investasi Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebesar Rp1.937.439.740.864,00 jauh melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp1.771.109.260.000,00. Dengan adanya capaian nilai investasi sebesar 104.39% tersebut mampu menurunkan angka pengangguran terbuka dari 4.92% pada tahun 2022, menjadi 4.05% pada tahun 2023. Dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan juga telah menunjukkan peningkatan dengan capaian predikat Sangat Baik pada penilaian Reformasi Birokrasi, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan perbaikan secara terus menerus dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik general maupun tematik.

Anggaran yang tersedia untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2023 untuk belanja sebesar Rp2.538.758.283.000,00, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp2.415.957.200.375,00 atau 95.16% (Realisasi sebelum pemeriksaan BPK menuju audited).

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kinerja Bupati Boyolali Tahun 2023. Selanjutnya dalam laporan ini akan menyajikan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Boyolali adalah:

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan perencanaan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan dan perbaikan kinerja tahun berikutnya; dan
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas pelaksanaan kinerja tahun 2023.

1.3. Gambaran Umum Daerah

1.3.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak antara $110^{\circ} 22'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 7'$ – $7^{\circ} 36'$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Boyolali berada pada jalur penghubung di antara tiga kota besar yaitu Solo, Yogyakarta dan Semarang sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan industri.

Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 101.510 ha, yang menempati 3.09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Kemusu dengan luas 8.143 ha, atau sekitar 8,07% dari luas seluruh wilayah, sedangkan Kecamatan Sawit memiliki luas daerah paling kecil yaitu 1.723 ha, atau sekitar 1.76% dari seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, terdiri dari 22 Kecamatan, 261 Desa dan 6 Kelurahan. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain yaitu:

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Secara umum topografi Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah yang termasuk ke dalam dataran tinggi berada di bagian barat yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo dan Ampel, ketinggian wilayah tersebut berada di kisaran 1.000 – 1500 Mdpl. Sedangkan wilayah paling rendah secara umum berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali yang meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Wonosamodro, Juwangi, Wonosegoro, Sambi dan Sebagian Kecamatan Boyolali, yaitu berada di kisaran 75 – 400 Mdpl.

1.3.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada akhir Tahun 2023 sebesar 1.099.682 jiwa yang terdiri dari 549.612 jiwa penduduk laki-laki dan 550.070 jiwa penduduk perempuan, tersebar di 22 Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ngemplak sebanyak 93.525 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Tamansari sebanyak 30.755 jiwa.

1.3.3. Kewenangan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Urusan Pemerintahan wajib, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan diselenggarakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f) Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a) Tenaga Kerja;
 - b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan Hidup;
 - f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan Informatika;
 - k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l) Penanaman Modal;
 - m) Kepemudaan dan Olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - a) Kelautan dan Perikanan
 - b) Pariwisata;
 - c) Pertanian;
 - d) Kehutanan;
 - e) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f) Perdagangan;
 - g) Perindustrian; dan
 - h) Transmigrasi.

1.3.4. Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Dinas Daerah (20), yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (2) Dinas Kesehatan;
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - (5) Dinas Sosial;
 - (6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (7) Dinas Ketahanan Pangan;
 - (8) Dinas Lingkungan Hidup;
 - (9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (11) Dinas Perhubungan;
 - (12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - (13) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - (14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (15) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - (16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - (17) Dinas Pertanian;
 - (18) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - (19) Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - (20) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Badan Daerah (4), yang terdiri dari:
 - (1) Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - (2) Badan Keuangan Daerah;
 - (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari 3 (tiga) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kelas C Kabupaten Boyolali;

- 7) Kecamatan (22), yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambi, Kecamatan Simo, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Karanggede, Kecamatan wonosegoro, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.
- 8) Kelurahan (6), yaitu Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Pulisen, Kelurahan Banaran, Kelurahan Sambeng, Kelurahan Mojosongo, dan Kelurahan Kemiri.

2. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya aparatur yang ditempatkan pada seluruh Perangkat Daerah dan Unit dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	41	16	57
2	SMP	74	13	87
3	SMA	455	134	589
4	Diploma I dan II	111	216	327
5	Diploma III	226	793	1019
6	Diploma IV dan S1	1549	2447	3996
7	S2	232	191	423
	Total	2688	3810	6498

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2023

Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda/I a	0	0	0
2	Juru Muda Tingkat I/I b	1	0	1
3	Juru/I c	1	0	1
4	Juru Tingkat I/I d	39	14	53
5	Pengatur Muda/II a	27	6	33
6	Pengatur Muda Tingkat I/II b	85	18	103
7	Pengatur/II c	123	123	246
8	Pengatur Tingkat I/II d	230	193	423
9	Penata Muda/III a	423	717	1140
10	Penata Muda Tingkat I/III b	433	711	1144
11	Penata/III c	241	487	728
12	Penata Tingkat I/III d	412	601	1013
13	Pembina/IV a	501	735	1236
14	Pembina Tingkat I/IV b	132	163	295
15	Pembina Utama Muda/IV c	36	36	72
16	Pembina Utama Madya/IV d	1	2	3
17	Pembina Utama/IV e	3	4	7
	Total	2688	3810	6498

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2023

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	27	6	33
2	Jabatan Administrator	138	46	184
3	Jabatan Pengawas	192	175	367
4	Jabatan Pelaksana	787	389	1176
5	Jabatan Fungsional	1544	3194	4738
	Total	2688	3810	6498

Sumber: BKPSDM Kab. Boyolali, 2023

3. Sumber Daya Keuangan

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 2.400.472.813.000,00
	- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 464.449.199.000,00
	- Pendapatan Transfer	Rp. 1.930.983.614.000,00
	- Pendapatan lain-lain	Rp. 5.040.000.000,00
b.	Belanja Daerah	Rp. 2.538.758.283.000,00
	1) Belanja Operasi	Rp. 1.642.240.257.400,00
	2) Belanja Modal	Rp. 471.694.238.600,00
	3) Belanja Tidak Terduga	Rp. 15.383.500.000,00
	4) Belanja Transfer	Rp. 409.440.287.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (138.285.470.000,00)
c.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 159.785.470.000,00
d.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 21.500.000.000,00
	Sisa lebih/Kurang	-

Sumber: BKD Kab. Boyolali, 2023

1.4. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan Pokok Urusan Pemerintahan Kabupaten Boyolali dapat dirumuskan bahwa isu strategis Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan;
- 3) Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing;
- 4) Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelaanjutan;
- 5) Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile;
- 6) Penanganan Bencana Alam dan Non Alam; dan
- 7) Inovasi dan Teknologi Informatika.

1.5. Prioritas dan Arah Kebijakan

Prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah “Pembangunan infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”. Pembangunan infrastruktur berorientasi untuk peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Boyolali, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar wilayah. Infrastruktur juga berperan membangun ikon Daerah yang mampu mengakselerasi pembangunan pariwisata dan sektor lainnya. Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023 meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Boyolali utara;
- 2) Peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan;
- 3) Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, prototype pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai fasilitas bagi warga;
- 4) Revitalisasi infrastruktur perdagangan melalui pemindahan pasar;
- 5) Penataan wilayah melalui perubahan status desa/kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan public;
- 6) Pembangunan RTLH untuk masyarakat yang membutuhkan dilengkapi dengan jamban sehat;
- 7) Penguatan literasi masyarakat melalui penyusunan dan diseminasi bahan bacaan berbasis nilai budaya “Boyolali Kaya Cerita”, serta pembangunan perpustakaan.
- 8) Bidang ekonomi antara lain: Bantuan modal usaha, Perbaikan irigasi, Pelatihan budidaya pertanian, Prasarana penangan bencana, Sarana prasarana pertanian;
- 9) Bidang Pemerintahan Sosial Budaya antara lain: Sarana prasarana penerangan jalan, Sarana prasarana difabel, Sarana prasarana sanitasi, Sarana prasarana social, Sarana prasara Teknologi informatika, Sarana prasarana olah raga, Rumah tidak layak huni, Sarana prasarana ibadah; dan
- 10) Bidang Infrastruktur meliputi: Pembangunan dan rehabilitasi jalan, Sarana air bersih, Penataan lingkungan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Kabupaten Boyolali disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjabaran latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum daerah, isu strategis, prioritas dan arah kebijakan, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi penjelasan tentang Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai hasil

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, antara realiasi tahun ini dengan realisasi nasional atau tertinggi nasional atau rata-rata nasional serta progres pencapaian target akhir RPJMD;
2. Analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
3. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
4. Realisasi anggaran yang digunakan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada masing-masing tujuan strategis.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Kabupaten Boyolali tahun 2023 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.
- B. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Boyolali Tahun 2023.
- C. Perjanjian Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2023.
- D. Monitoring Pencapaian Kinerja Triwulan I,II,III dan IV.
- E. Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun didasarkan pada perencanaan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026, yang memuat Visi Bupati Boyolali yaitu:

“Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi”

Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

Dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi Dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter Dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Terpercaya; dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri Dan Berdaya Saing.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Boyolali Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan dengan 38 (tiga puluh delapan) sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan 1. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya nilai investasi;
 - 2) Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan;
 - 3) Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - 4) Meningkatnya pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - 5) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian;
 - 6) Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa;
 - 7) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian;
 - 8) Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian; dan
 - 9) Meningkatnya kenyamanan transportasi.
- b. Tujuan 2. Menurunnya tingkat kemiskinan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Menurunnya pengangguran;
 - 2) Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja; dan
 - 3) Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.
- c. Tujuan 3. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan;
 - 2) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan;

-
- 3) Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan;
 - 4) Meningkatnya pengendalian penduduk; dan
 - 5) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- d. Tujuan 4. Meningkatnya ketahanan sosial, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Menurunnya resiko bencana; dan
 - 2) Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat.
- e. Tujuan 5. Meningkatnya keberdayaan sosial, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak;
 - 2) Meningkatnya kesejahteraan PMKS; dan
 - 3) Meningkatnya keberdayaan desa.
- f. Tujuan 6. Meningkatnya kesejahteraan petani, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian;
 - 2) Meningkatnya kualitas susu;
 - 3) Meningkatnya agro industri susu; dan
 - 4) Meningkatnya Ketahanan Pangan.
- g. Tujuan 7. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah;
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 3) Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah;
 - 4) Terwujudnya *smart governance* Boyolali; dan
 - 5) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- h. Tujuan 8. Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali, dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya kualitas air;
 - 2) Meningkatnya kualitas udara;
 - 3) Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
 - 4) Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah
 - 5) Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness;
 - 6) Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni; dan
 - 7) Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 disusun berdasar RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan perubahannya. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	5,45 – 6,67 persen
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan	8,18 - 7,18 persen
3	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,8 angka
4	Meningkatnya ketahanan sosial	1 Indeks Resiko Bencana (IRB)	110,32 angka
		2 Angka Konflik Sosial	0 angka
5	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	1 Indeks Pemberdayaan Gender	81,97 angka
		2 Angka PMKS	61.029 angka
		3 Indeks Desa Membangun	0,7361 angka
6	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	107,64 angka
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	823 angka
8	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,54 angka
		2 Indeks smart city	3,2 angka

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kab.Boyolali 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat akuntabilitas kinerja menunjukkan derajat keterukuran kinerja Pemerintah. Akuntabilitas kinerja dituangkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, dan faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Pada bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja tujuan yang dilengkapi dengan penjelasan sasaran dan program yang mendukung, realisasi anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta inovasi terkait sasaran/indikator kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten didukung oleh kinerja Perangkat Daerah yang didukung oleh kinerja Pejabat dari tingkat tertinggi sampai pada level staf terendah. Pada awal tahun, Bupati menyusun Perjanjian Kinerja yang diikuti oleh Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya diturunkan pada masing-masing Pejabat dibawahnya sampai pada level Pelaksana terendah. Setiap bulan masing-masing Pegawai menyusun rencana aksi dan capaian kinerjanya melalui aplikasi *e-kinerja.boyolali.go.id*, sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai. Selanjutnya masing-masing Perangkat Daerah melakukan input data capaian kinerja bulanan Perangkat Daerah pada aplikasi *e-laporint.boyolali.go.id* sebagai bahan monitoring Bupati atas capaian kinerja bulanan Perangkat Daerah. Bukti input data dimaksud akan menjadi salah satu syarat dalam pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulannya. Capaian kinerja Perangkat Daerah merupakan pendukung capaian kinerja Bupati.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus:

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menyimpulkan pencapaian target kinerja tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal berdasar pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Ordinal Capaian Kinerja

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, antara realisasi kinerja atau capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi atau capaian tahun 2022, realisasi kinerja nasional tahun 2023 dan target kinerja akhir periode RPJMD 2021-2026. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan Efisiensi pencapaian target kinerja. Berikut hasil pengukuran kinerja tahun 2023:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2023	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi							
1	Laju pertumbuhan ekonomi	5.68 - 6.15	5.45 – 6.67	4.63	6.33	5.63	5.04
Tujuan 2: Menurunnya tingkat kemiskinan							
2	Tingkat kemiskinan	5.18 - 2.68	8.18 – 7.18	10.18	9.82	9.81	9.36
Tujuan 3: Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing							
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,34	75.8	74.4	74.97	75.41	74.39
Tujuan 4: Meningkatnya ketahanan sosial							
4	Indeks Resiko Bencana (IRB)	80,32	110.32	130.32	130.32	110.06	109.01
5	Angka Konflik Sosial	8	0	15	-	-	-
Tujuan 5: Meningkatnya keberdayaan sosial							
6	Indeks Pemberdayaan Gender	82	81.97	82.23	82.23	82.94	76.59
7	Angka PMKS	66.153	61.029	58.331	61.029	53.122	-

8	Indeks Desa Membangun	0,7553	0.7361	0.7233	0.7349	0.7505	0.6934
Tujuan 6: Meningkatnya kesejahteraan petani							
9	Nilai Tukar Petani	109,8	107,64	102.76	107.27	117.11	117.76
Tujuan 7: Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang baik							
10	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	903	823	833	843	893	-
Tujuan 8: Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali							
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,71	66,54	63.93	60.77	61.39	72.54
12	Indeks smart city	3,28	3,2	3.31	3.15	3.3	3.84 (Kab/Kota tertinggi)

3.2. Analisa Pengukuran Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 8 Tujuan dengan 12 Indikator, sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

TUJUAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi			Capaian
		2021	2022	2023	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.45 – 6.67%	4.63%	6.33%	5.63%	103.3%

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 1

Indikator kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.68-6.15%	5.63%	99.28%	5.04%	+0.59

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5.63%. Jika disandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 5.45-6.67%, maka telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 103.3.

Angka tersebut mengalami penurunan cukup tinggi dari tahun 2022 sebesar 0.7, dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 6.33%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka laju pertumbuhan ekonomi telah mencapai 99.28%, dengan target akhir RPJMD sebesar 5.68 - 6.15%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih tinggi sebesar 0.59 poin dimana realisasi nasional sebesar 5.04%

Perkembangan Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2019 – 2023



Pertumbuhan ekonomi adalah perbandingan pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi menggambarkan besarnya peningkatan produksi yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan pembangunan yang berlangsung dalam periode tertentu. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku menurut lapangan usaha dari berbagai sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosia, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Capaian pada setiap sektor di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian PDRB Setiap Sektor Tahun 2019-2023

PDRB setiap Sektor	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
pertanian, kehutanan, dan perikanan	3.36	2.01	3.45	1.29	1.47
pertambangan dan penggalian	4.49	2.47	-0.04	2.36	-0.49
Industri pengolahan	7.06	1.83	5.5	4.44	7.11
Pengadaan listrik dan gas	5.30	-2.3	6.00	4.29	13.13
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	13.37	-0.01	2.91	1.72	7.83
Konstruksi	5.79	-3.69	9.13	2.67	9.72
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.55	-3.72	8.61	4.33	5.60
Transportasi dan pergudangan	5.71	-41.17	-3.17	104.29	8.76
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.62	-5.55	3.18	19.98	12.4
Informasi dan komunikasi	13.49	18.58	0.49	2.22	12.55
Jasa keuangan dan asuransi	2.70	3.12	5.29	2.06	6.13
Real estate	6.19	-1.24	1.72	5.53	8.42

Jasa perusahaan	10.49	-4.73	3.13	6.14	8.61
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	2.40	-0.02	0.99	-1.72	-0.72
Jasa pendidikan	7.89	-0.21	4.42	2.62	0.33
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7.10	6.37	2.89	-1.16	-0.18
jasa lainnya	8.17	-7.09	1.33	9.23	8.52

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai investasi

Peningkatan nilai investasi mempunyai andil besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan nilai investasi tersebut ditandai dengan realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.937.439.740.864. Upaya peningkatan nilai investasi dilaksanakan melalui pengembangan budaya dan citra pro investasi dengan program promosi penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta pengendalian penanaman modal yang mengarah pada pendampingan percepatan realisasi investasi Promosi investasi yang focus dan efektif, Optimalisasi Potensi Investasi, Peningkatan iklim penanaman modal melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Penyediaan infrastruktur ekonomi, terjalannya Kemitraan antara pemerintah, Investor menengah dengan usaha industri mikro kecil, pengendalian inflasi, Optimalisasi investasi di wilayah Utara dan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Mal Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali

2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian

Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan ditandai dengan peningkatan PDRB sektor perdagangan yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2023 sebesar 5.6%. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 1.27. Peningkatan PDRB sektor perdagangan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemasaran barang dengan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang mengarah pada pemberian fasilitas promosi kepada pelaku usaha, pemberian rekomendasi ijin toko modern, dan program pengembangan ekspor yang mengarah pada peningkatan pelaku usaha ekspor dengan cara melakukan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan di Boyolali.

3. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian

Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian ditandai dengan peningkatan PDRB sektor perindustrian yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor perindustrian tahun 2023, sebesar 7.11%. Angka tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2022 sebesar 2.67. Peningkatan pertumbuhan sektor industri dilaksanakan melalui peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah dengan program perencanaan dan pembangunan industri yang mengarah pada pembinaan dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas industri kecil menengah, akses permodalan, penggunaan teknologi tepat guna dan pelatihan E Commerce.

4. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian

Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata ditandai dengan peningkatan PDRB sektor pariwisata yang berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tahun 2023 sebesar 12.4%.

Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 dengan angka sebesar 19.98%. Upaya peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan daya tarik wisata, optimalisasi pemasaran destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan fasilitasi pengembangan sentra dan sumber ekonomi kreatif, dengan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang mengarah pada pengelolaan obyek wisata, peningkatan dan pemeliharaan destinasi wisata, pelaksanaan promosi melalui berbagai media, pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Boyolali telah membangun infrastruktur ikonik berupa sarana simulasi ibadah haji, yang akan mulai beroperasi pada tahun 2024. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan Daerah dari bidang pariwisata.

5. Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa

Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa menyebabkan inflasi lebih terkendali sehingga berpengaruh pada meningkatnya pendapat riil dan daya beli masyarakat, sehingga standar hidup masyarakat menjadi naik. Indeks harga konsumen pada tahun 2023 sebesar 118,52. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,67 poin, dimana indeks harga konsumen tahun 2022 sebesar 114,85. Peningkatan stabilitas harga dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan stok barang pokok dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang mengarah pada pengendalian harga dan stok barang penting di tingkat pasar dan melaksanakan operasi pasar saat diperlukan dan program peningkatan sarana distribusi perdagangan yang mengarah pada penyediaan dan pemeliharaan sarana perdagangan agar tetap dalam kondisi baik, penataan pedagang di pasar tradisional, dan pemberian ijin perjanjian sewa menyewa toko, kios, dan los pasar tradisional.

6. Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya

Banyaknya perusahaan yang dibangun di Kabupaten Boyolali telah memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, hal tersebut tercermin dari adanya kepedulian dari perusahaan terhadap lingkungan sosial disekitarnya dengan keterlibatannya dalam upaya pembangunan. Persentase peningkatan peran perusahaan ditargetkan 100% telah terealisasi sebesar 100%. Upaya peningkatan peran perusahaan dilaksanakan melalui optimalisasi TJSLP dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada pelaksanaan koordinasi dalam TJSLP dengan membentuk Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diketuai oleh Bupati Boyolali dan melibatkan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Boyolali.

7. Meningkatnya kenyamanan transportasi

Meningkatnya kenyamanan transportasi ditandai dengan Rasio konektivitas yang lancar, memberi pengaruh terhadap tersambungnya sentra-sentra produktif ekonomi masyarakat, sehingga laju distribusi barang akan semakin lancar dan meningkatnya daya saing produk ekonomi dan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Rasio konektivitas tahun 2023 sebesar 0,51, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2022. Upaya peningkatan kenyamanan transportasi dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan dan pengembangan drainase, peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai dan pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan, dengan program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), yang mengarah pada pengaktifan kembali beberapa jalur trayek angkutan umum yang sempat

berhenti, penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan dan prasarana jalan, Penyediaan perlengkapan guna rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan jalan kabupaten, penyediaan dan pemasangan andalalin, penyediaan dan pengelolaan tempat parkir, pemeliharaan terminal, dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.

8. Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD

Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD maka semakin meningkat pula sumber dana untuk pembangunan daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk peningkatan PAD menjadi salah satu strategi guna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Boyolali. Pemanfaatan BMD ini ditargetkan meningkat setiap tahunnya, tahun 2022 pemanfaatan BMD fokus pada tanah pertanian, sedangkan tahun 2023 pemanfaatan BMD bertambah pada tanah lapang. Semakin banyaknya BMD yang produktif, maka semakin besar pula PAD yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

9. Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan

Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat agar lingkungan sekitar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu penyumbang kerusakan lingkungan dan pencemaran adalah perusahaan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya untuk meminimalisir pencemaran lingkungan dan meningkatkan persentase perusahaan yang ramah lingkungan. Saat ini sebesar 98% perusahaan masuk dalam kategori ramah lingkungan. Upaya untuk meminimalisir adanya pencemaran akibat pengoperasian perusahaan dilakukan dengan dengan mendorong perusahaan untuk menaati kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatannya, antara lain memiliki dokumen perizinan berusaha/ persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, memiliki IPAL pengolah air limbah dan menguji kualitas air limbahnya, melakukan uji kualitas udara sesuai peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan triwulan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perusahaan ramah lingkungan mengedepankan kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Mereka secara konsisten menjaga 3K (Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan RL (Ramah Lingkungan) dalam proses produksi. Secara sederhana perusahaan ramah lingkungan dapat diartikan tidak ada permasalahan berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam pengelolaan perusahaan, yang akan memunculkan aduan lingkungan dari masyarakat. Peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan dilaksanakan melalui penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan *green company*, *green strategy*, *green process*, *green product*, *green employee* dengan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang mengarah pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan, pengawasan terhadap usaha yang telah berizin, sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH serta pemberian penghargaan kepada dunia usaha/kegiatan.

Meskipun realisasi yang dicapai telah melampaui target yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang ditemui. Adapun kendala/hambatan serta solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan stabilitas harga barang dan jasa terkendala saat adanya perayaan hari raya, natal atau kegiatan yang merupakan budaya lokal berupa

- nyadran. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan sehingga terjadi lonjakan harga. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melakukan operasi pasar menjelang peringatan hari besar tersebut, sehingga kenaikan harga yang terjadi masih dalam taraf wajar dan tidak berlebihan.
2. Upaya peningkatan pertumbuhan PDRB sektor industri khususnya industri sedang terkendala dengan masih terbatasnya pemahaman, kesadaran, kemauan/motivasi untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi produksi dan pemasaran yang berakibat pada kontribusi PDRB sektor industri. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM.
 3. Ketersediaan lahan untuk peruntukan industri di wilayah Peruntukan Industri, *Miss Match* antara Kompetensi dan Ketersediaan Tenaga Kerja, Adanya kendala sistem OSS BKPM dan *help Desk* OSS di BKPM yang kurang responsif, menjadi hambatan dalam peningkatan nilai investasi, atas hambatan tersebut dilakukan penanganan dengan melaksanakan fasilitasi Penyediaan Lahan sesuai dengan peruntukannya/Tata Ruang, Penyediaan Balai Latihan Kerja sesuai dengan industri terkait, dan Melakukan pendampingan dan koordinasi dalam penerapan OSS dengan Kementerian Investasi /BKPM.
 4. Adanya perubahan regulasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan masa transisi penerapan peraturan perundangan tersebut berdampak pada ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam rangka upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan konsultasi, koordinasi serta sosialisasi peraturan perundangan bidang lingkungan hidup.
 5. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepedulian perusahaan kepada masyarakat, dan terhadap adanya pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu kepada perusahaan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Bupati Boyolali telah mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya dan sinergi dengan program pembangunan daerah serta perusahaan terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan capaian kinerja 122.91%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp153.121.562.700,00 dan realisasi sebesar Rp148.868.978.677,00 dengan capaian sebesar 97%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2.78%. Upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi didukung dengan 18 (delapan belas) program, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Program Pengembangan Ekspor;
8. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen;

9. Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
13. Program Penyelenggaraan Jalan;
14. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
17. Program Pemasaran Pariwisata; dan
18. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 2 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Indikator kinerja	Target 2023	Realisasi			Capaian 2023
		2021	2022	2023	
Tingkat kemiskinan	8.18 – 7.18%	10.62%	9.82%	9.81%	80.07%

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 2

Indikator kinerja	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Tingkat kemiskinan	5.18 - 2.68%	9.81%	8.18%	9.36%	+ 0.45

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 sebesar 80.07% dari target sebesar 8,18–7,18%, terealisasi sebesar 9,81% (berdasarkan data BPS), namun demikian berdasarkan satu data yang dibangun oleh Kabupaten Boyolali tingkat kemiskinan tahun 2023 berada pada posisi 6,68% dengan capaian kinerja sebesar 118,34%.

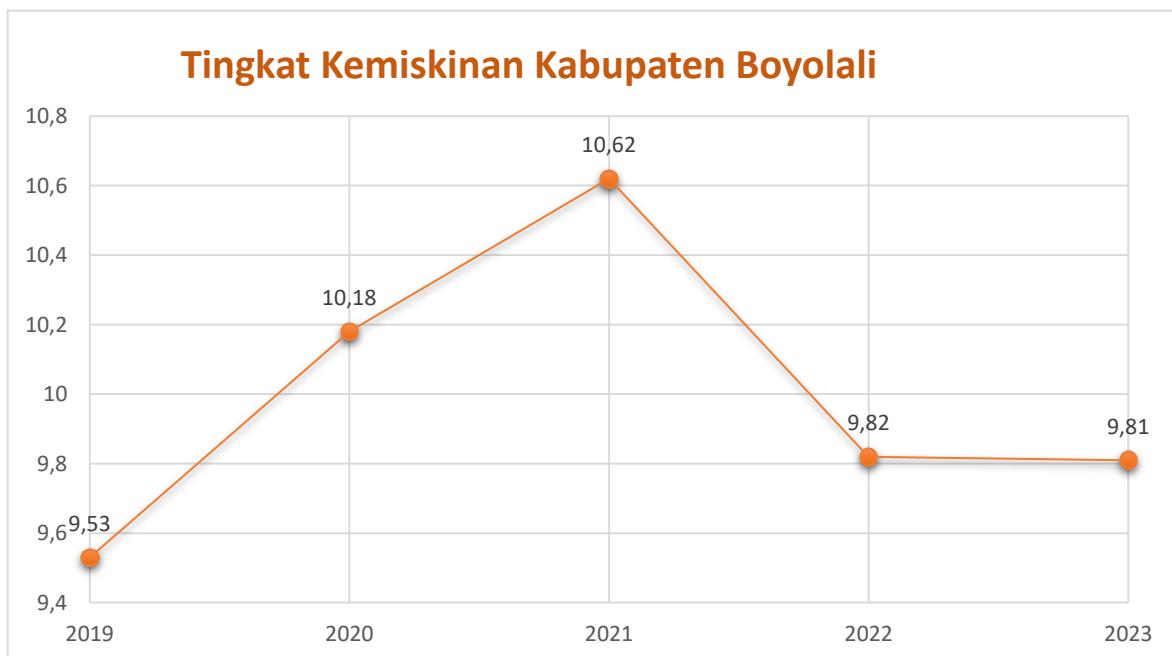
Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0.01 poin atau (0.28 poin atau 4% versi satu data Boyolali), dimana tingkat kemiskinan tahun 2022 tercatat sebesar 9.82.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya penurunan tingkat kemiskinan di Boyolali telah mengalami progres sebesar 7.4% atau (70% versi satu data Boyolali) dari data awal tahun 2020 sebesar 10.18%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih tinggi 0,45 poin atau (lebih rendah sebesar 2,68 poin, versi satu data Boyolali) dari angka kemiskinan nasional dimana angka kemiskinan nasional 2023 tercatat sebesar 9,36%.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali 2019 - 2023



Unsur-unsur yang berperan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena tidak adanya penghasilan yang mencukupi menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga disebut sebagai miskin. Menurunnya pengangguran ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 4.05%, mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0.87, dimana tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 tercatat sebesar 4.92%. Penurunan tingkat pengangguran dilaksanakan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, yang diarahkan pada pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja, dan membangun perjanjian kerja sama agar memberi prioritas kepada tenaga kerja lokal (Kabupaten Boyolali).

2. Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja

Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja memberi dampak tidak langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Adanya jaminan perusahaan akan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja menyebabkan masyarakat dalam hal ini buruh atau pekerja perusahaan menjadi tenang dalam bekerja, sehingga tidak ada alasan yang memaksa pekerja untuk keluar dari pekerjaan dan menjadi

pengangguran yang akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat) tahun 2023 mencapai 100% dari target sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa semua Perusahaan di Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perlindungan hak-hak pekerja.

Peningkatan perlindungan hak-hak tenaga kerja dilaksanakan melalui upaya penurunan perselisihan hubungan industrial dengan program hubungan industrial, yang diarahkan pada pembinaan kepada perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, memenuhi kewajiban terhadap tenaga kerja sehingga tidak terjadi perselisihan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

3. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian

Sektor koperasi dan usaha kecil menengah memberi kontribusi yang besar pula terhadap menurunnya angka kemiskinan. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, sedangkan UMKM adalah merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat di sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dari pengertian tersebut sudah dapat dipastikan bahwa koperasi dan UMKM memberikan kemudahan kepada masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berarti pula menurunkan tingkat kemiskinan. Kesehatan koperasi salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan SHU setiap tahunnya. Persentase koperasi yang SHUnya meningkat tahun 2023 sebesar 53%, meningkat sebesar 32% dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2022 adalah sebesar 40.13%. Sedangkan kemajuan usaha mikro ditandai dengan peningkatan omzet setiap tahunnya. Jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya tahun 2023 sebesar 65, meningkat sebesar 8% dari tahun sebelumnya, dimana realisasi tahun 2022 sebesar 60. Peningkatan kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pengurus koperasi, peningkatan kualitas pengelolaan koperasi, peningkatan kapasitas SDM pelaku pelaku UMKM, peningkatan standarisasi produk UKM, peningkatan akses permodalan dengan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan UMKM, yang diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan, pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi, pelatihan pelaku usaha mikro, pemberdayaan kemitraan usaha mikro, dan pendampingan terhadap usaha mikro.

Upaya penurunan angka kemiskinan juga dilaksanakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta peningkatan kebutuhan akses informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali. Kesemua upaya tersebut disamping dengan menggunakan APBD dan APBN juga dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak baik antar Perangkat Daerah maupun pihak eksternal dalam hal ini adalah Pemerintah Desa, Baznas dan swasta. Pemerintah Kabupaten Boyolali sangat serius dalam upaya penurunan angka kemiskinan dimulai dengan pemberian bantuan

kemiskinan yang berbasis RT, sehingga data yang diperoleh lebih valid, dan memudahkan dalam penanganannya dengan segera.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya penurunan angka kemiskinan serta solusi yang dilakukan adalah adanya perbedaan data kemiskinan antar Instansi, sehingga menghambat upaya penanganannya. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Boyolali membangun satu data yang berbasis Rukun Tetangga (RT) yang melakukan *update* data setiap saat. Adanya data berbasis Rukun Tetangga tersebut dapat menyajikan data yang valid. Disamping itu telah dibentuk Tim tanggap sosial yang menangani berbagai masalah sosial termasuk didalamnya masalah kemiskinan, dimana setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dilaporkan kepada Camat dan disampaikan dalam wa grup tanggap sosial, dan dalam waktu singkat segera mendapat penanganan terhadap permasalahan tersebut.

Penurunan tingkat kemiskinan dengan capaian kinerja 93.03% didukung dengan penganggaran sebesar Rp3.031.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.965.381.188,00 dengan capaian sebesar 98%, dengan efisiensi 0. Namun dengan menggunakan data versi satu data Boyolali maka capaian kinerja sebesar 118.34%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2%. Adapun dalam pencapaian target tujuan kedua ini didukung dengan 6 (enam) program, sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian; dan
6. Program Pengembangan UMKM.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 3 : Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi			Capaian 2023
		2021	2022	2023	
Indeks Pembangunan Manusia	75.8%	74.4%	74.97%	75.41%	99.5%

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 3

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	77.34%	75.41%	37.54%	74.39%	+1.02 poin

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 sebesar 99.5% dari target sebesar 75.8% terealisasi sebesar 75.41%.

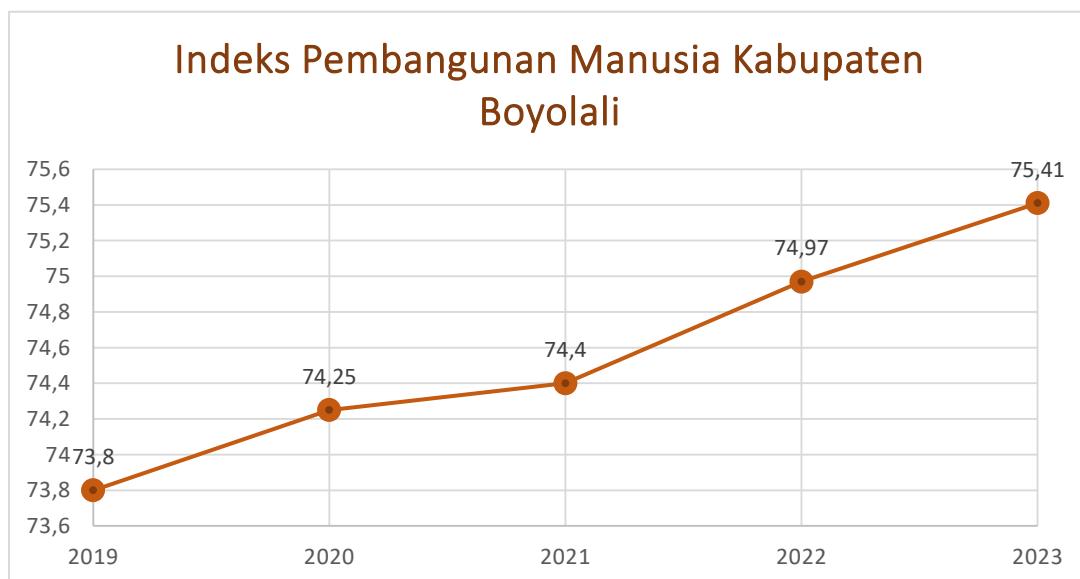
Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1.16 poin, dimana indeks pembangunan manusia tahun 2022 tercatat sebesar 74.97%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya peningkatan indeks pembangunan manusia di Boyolali telah mengalami progres sebesar 37.54% dari baseline awal tahun 2020 dimana indeks pembangunan manusia berada pada angka 74.25%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia secara nasional maka indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali lebih tinggi sebesar 1.02 poin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Perkembangan IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan rumusan dari *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dalam angka harapan hidup
Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun, sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun karena sistem registrasi di Indonesia yang belum berjalan baik, maka penghitungan dilakukan secara tidak langsung melalui data hasil sessus atau survei kependudukan.
- 2) Pengetahuan, yang diukur melalui: harapan lama sekolah (HLS), dan rata-rata lama Sekolah (RLS)
Harapan lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.
Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun keatas, dengan asussi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
- 3) Standar hidup layak, yang diukur melalui pengeluaran perkapita
Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut maka capaian komponen IPM Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Capaian Komponen IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Komponen IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	75.83	79.95	76.03	76.12	76.23
Harapan Lama Sekolah	12.43	12.56	12.57	12.62	12.66
Rata-rata Lama Sekolah	7.56	7.84	7.85	8.08	8.09
Pengeluaran perkapita Disesuaikan	13.079	12.910	13.031	13.250	13.716

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Keberhasilan peningkatan Indeks pembangunan Manusia di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan, yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan gedung, penyediaan sarana prasarana pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan evaluasinya, pemberian beasiswa, pelaksanaan lomba siswa, pemerataan tenaga pendidik, pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah sesuai dengan SNP, fasilitasi penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan, penyediaan sarana baca melalui pelayanan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling.

-
- 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi, peningkatan penanganan gizi buruk dan stunting, peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dengan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan, Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang diarahkan pada fasilitasi pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standart, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, penyelenggaraan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis, kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV, penderita hipertensi, diabetes militus, orang dengan gangguan jiwa, pengelolaan surveillans kesehatan, pengelolaan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa, Pelayanan kesehatan pada usia dasar, usia produktif, dan usia lanjut, penyelenggaraan kabupaten sehat, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan, pelaksanaan posyandu, pembinaan kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat (Germas).
 - 3) Pengendalian penduduk guna meningkatkan ketercukupan kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran perkapita. Pengendalian penduduk dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan keluarga berencana, dengan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, pembinaan Keluarga Berencana, pengendalian penduduk, yang diarahkan pada upaya peningkatan kepesertaan penggunaan kontrasepsi, penyediaan alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan KB pria, pemberian sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
 - 4) Peningkatan nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan. Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya tersebut dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir atau hukum adat. Peningkatan dan pelestarian budaya lokal sangat diperlukan dalam upaya menunjukkan identitas dan sebagai katalisator dalam pembangunan. Memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan budaya lokal dalam pembangunan akan menimbulkan banyak permasalahan kedepannya, namun jika kita meningkatkan dan memanfaatkan budaya lokal yang sudah ada, maka pembangunan akan lebih mudah dan bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat. Peningkatan nilai budaya lokal dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai religius, Peningkatan pengelolaan permuseuman, dengan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan permuseuman, dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang diarahkan pada pelestarian cagar budaya, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kesenian, pelaksanaan gelar seni budaya, pengelolaan museum, fasilitasi kegiatan keagamaan, dan pemberian bantuan bidang keagamaan.

5) Peningkatan kontribusi pemuda dalam pembangunan.

Pemuda merupakan salah satu aset yang berperan sebagai subyek pembangunan. Adanya peran aktif pemuda dalam pembangunan menunjukkan bahwa kualitas pemuda dalam hal ini sebagai sumber daya manusia adalah baik, sehingga memberi kontribusi terhadap perhitungan indeks pembangunan manusia. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan di Boyolali dapat dilaksanakan melalui pemerataan fasilitas olahraga, pembinaan klub olahraga, pengembangan organisasi kepemudaan, peningkatan kualitas organisasi kepramukaan, peningkatan olahraga rekreasi, peningkatan prestasi olahraga, dengan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, pengembangan kapasitas kepramukaan, yang diarahkan pada penyediaan sarana prasarana olahraga, pelatihan bagi pelatih, keikutsertaan event olahraga, pemberian penghargaan pada atlet dan pelatih berprestasi, peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dan kepramukaan.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukan adanya siswa yang putus sekolah meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pendekatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada keluarga siswa putus sekolah. Menelusuri penyebabnya dan menyelesaiakannya sehingga angka putus sekolah bisa ditekan. Selain itu bagi warga yang putus sekolah dalam hal ini tidak memiliki ijazah tingkat dasar, maka dilakukan pendekatan melalui pendidikan luar sekolah, guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan dan mendapatkan ijazah program penyetaraan baik paket A, B maupun C.
2. Masih tingginya kasus balita dengan gizi buruk yang mempengaruhi angka harapan hidup, atas kendala tersebut maka dalam rangka peningkatan gizi bagi balita Dinas Kesehatan melalui Puskesmas bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan kader dalam pemantauan, pendampingan, pemberian makanan tambahan, serta pemberian edukasi tentang pemberian makanan yang memenuhi gizi seimbang bagi anak
3. Masih belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan, guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Pemuda-pemuda melalui pengarahan atau sosialisasi, peningkatan ketrampilan, peningkatan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan memanfaatkan peluang dengan kreativitas dan menciptakan sesuatu yang inovatif.
4. Terbatasnya fasilitas yang disediakan pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui budaya daerahnya sendiri dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melestarikan budaya Kurangnya minat untuk mempelajari dan mengenal budaya daerah lebih mendalam. Atas permasalahan tersebut dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya dan menghidupkan kembali budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal perlu dikembangkan dan di pertahankan dalam masyarakat karena yang paling utama adalah kearifan lokal itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengambil sikap peduli kepada alam sekitar, kepada masyarakat, dan kodisi fisik lingkungan.

Peningkatan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing dengan capaian kinerja 99.6% didukung dengan penganggaran sebesar Rp544.661.924.795,00 dan

realisasi sebesar Rp480.680.420.690,00 dengan capaian sebesar 88%, dengan efisiensi 0. Adapun dalam pencapaian target tujuan ketiga ini didukung dengan 16 (enam belas) program, sebagai berikut:

1. Program pengelolaan pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan;
5. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
6. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
7. Program pembinaan perpustakaan;
8. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
9. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
10. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
11. Program Pengembangan kesenian tradisional;
12. Program Pelestarian Cagar Budaya;
13. Program pengelolaan permuseuman;
14. Program Keluarga Berencana;
15. Program Pengendalian Penduduk; dan
16. Program Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 4 : Meningkatnya Ketahanan Sosial

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi			Capaian 2023
		2021	2022	2023	
Indeks Resiko Bencana	120.32	130.32	130.32	110.06	100.24%
Angka Konflik Sosial	16	0	0	0	100%

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 4

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Resiko Bencana	80.32	110.06	-	109.01 (Jateng)	+1.05
Angka Konflik Sosial	8	0		-	

1. Indeks Resiko Bencana

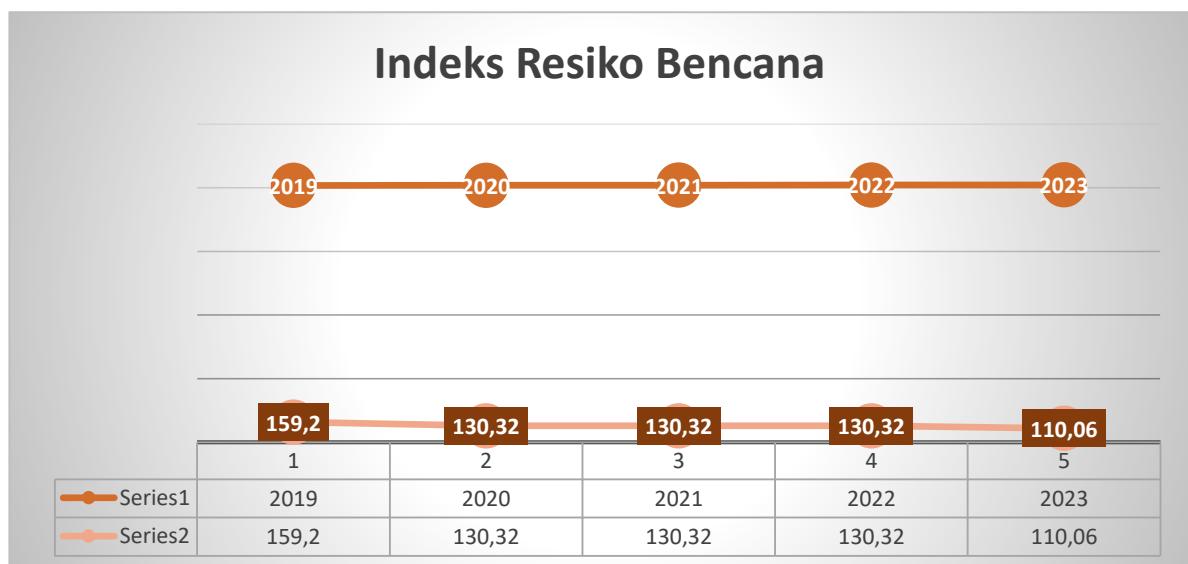
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks resiko bencana tahun 2023, sebesar 100.06, jika dibandingkan dengan target 2023 sebesar 110.32 maka angka tersebut lebih rendah atau lebih baik dengan capaian sebesar 100.24%

Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 20.26 dari dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka indeks resiko bencana di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 41% dari data dasar 2020.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indek resiko bencana Provinsi Jawa Tengah maka Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali lebih tinggi yaitu sebesar 1.05 diatas Indeks Risiko bencana Provinsi jawa Tengah yaitu sebesar 109.01

Indeks resiko bencana di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kemandegan namun ada kecenderungan penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4 Indeks Resiko Bencana 2019-2023



Unsur yang paling berperan dalam penurunan indeks resiko bencana di Kabupaten Boyolali adalah menurunnya resiko bencana. Indeks resiko bencana ditentukan berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu:

- *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilita spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi dan lainnya.
- *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan;
- *Capacity* (kapasitas) dinilai menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
 - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka rincian komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori tinggi dan sedang dalam perhitungan bahaya (*hazard*). Keadaan bahaya dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga kemungkinan penurunan pada unsur tersebut sangat kecil. Upaya yang mungkin bisa diusahakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah dengan cara penurunan angka kerentanan (*vulnerability*) dan peningkatan indeks kapasitas Daerah (*capacity*). Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan penanggulangan bencana, dengan program penanggulangan bencana, yang diarahkan pada penyusunan dokumen kajian resiko bencana, sosialisasi, informasi dan edukasi rawan bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana, penanganan pasca bencana, Pelatihan Tim penanggulangan bencana, penyaluran logistik bagi korban bencana, membangun kemitraan dalam penanggulangan bencana, dan monev penanggulangan bencana.

2. Angka Konflik Sosial

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konflik sosial pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Boyolali cukup baik.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Kabupaten Boyolali berhasil mengendalikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD dengan perkiraan angka konflik sosial sebesar 8, maka realisasi tahun 2023 sudah melampaunya.

Angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali tidak dapat disandingkan dengan angka konflik sosial secara nasional, karena perbedaan luas wilayah dan kondisi keamanan yang berbeda pada masing-masing daerah di Indonesia.

Angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Angka Konflik Sosial 2020-2023



Unsur yang paling berperan dalam penurunan angka konflik sosial di Kabupaten Boyolali adalah dengan meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat yang ditandai dengan adanya penurunan angka potensi konflik sosial. Kohesivitas sosial masyarakat merupakan proses kesatuan, kelekatan atau daya tarik individu di masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan dan motivasi untuk bersama di dalamnya yang memiliki tingkat ketertarikan dan keyakinan untuk bersama dalam keberhasilan bersama, dimana didalamnya adanya rasa saling menyukai, membantu, dan secara bersama-sama saling mendukung dalam mencapai satu tujuan. Kohesivitas akan meningkatkan produktivitas, konformitas terhadap norma di masyarakat, memperbaiki semangat dan kepuasan, mempermudah komunikasi, mengurangi permusuhan, meningkatkan rasa aman dan harga diri. Dari pengertian tersebut dapat disampaikan bahwa meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat akan meningkatkan kepedulian antar sesama, saling menghormati dan menghargai, sehingga mengurangi adanya gesekan kepentingan yang memicu adanya potensi konflik yang berujung pada konflik di masyarakat. Angka potensi konflik tahun 2023 sebesar 0, menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 3 potensi konflik.

Upaya penurunan angka potensi konflik di Boyolali dilaksanakan melalui peningkatan deteksi dini gangguan stabilitas wilayah dengan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial, penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, yang diarahkan pada Pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik, fasilitasi kerukunan umat beragama, sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, pelaksanaan patroli keamanan, penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, Pelatihan tenaga pengamanan, membangun kemitraan dalam pencegahan dan penanganan, pelayanan pemadaman kebakaran, penyediaan sarana prasarana penanganan kebakaran, dan peningkatan kualitas tenaga pemadam kebakaran.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan ketahanan sosial adalah terbatasnya kapasitas SDM penanganan bencana dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, Atas kendala tersebut maka dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM penanganan bencana, penyediaan sarana prasarana penanganan bencana dan dilakukan sosialisasi, pengarahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat.

Peningkatan ketahanan sosial dengan capaian kinerja 91,69% dan 200%, dengan rata-rata 145,5% didukung dengan penganggaran sebesar Rp7.413.416.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.204.383.339,00 dengan capaian sebesar 97,18%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,82%. Adapun dalam pencapaian target tujuan keempat ini didukung dengan 8 (delapan) program, sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
4. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;

5. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
6. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
7. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 5 : Meningkatnya Keberdayaan Sosial

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi			Capaian
		2021	2022	2023	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81.97	81.95	82.23	82.94	101.18%
Angka PMKS	60.000	-	61.029	53.122	112.96%
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7361	0.7233	0.7349	0.7505	101.96%

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 5

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	82	82.94	883%	76.59	+6.35
Angka PMKS	66.153	53.122	351%	-	-
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7553	0.7505	91.775	0.6935	+0.057

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2023 sebesar 82.94, jika disandingkan dengan target tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100.18% dari target sebesar 81.97 terealisasi sebesar 82.94

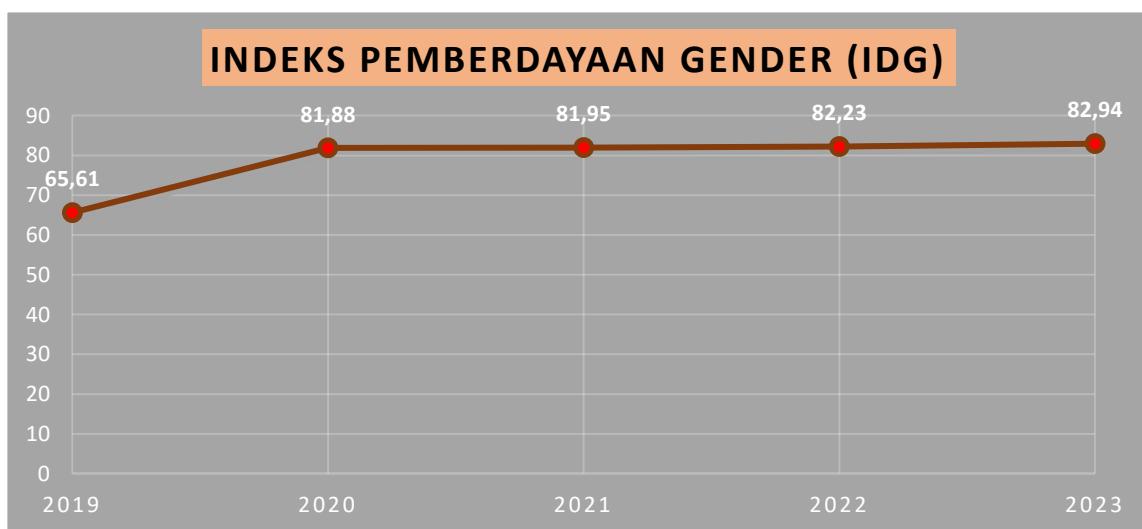
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0.71 poin, dimana Indeks pemberdayaan gender tahun 2022 tercatat sebesar 82.23.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks pemberdayaan gender di Boyolali telah melampaui target akhir RPJMD, namun demikian target tahunan akan selalu disesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target akhir RPJMD pun akan berubah.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks pemberdayaan gender secara nasional maka Kabupaten Boyolali masih lebih baik yaitu sebesar 6.35 dimana indeks pemberdayaan gender secara nasional nasional sebesar 76.59.

Indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6 Indeks Pemberdayaan Perempuan 2019-2023



Berdasarkan rumusan dari Badan Pusat Statistik, Indeks Pemberdayaan Gender bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka mengukur hal tersebut maka BPS menghitung angka IDG dengan melihat partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumangan perempuan dalam pendapatan kerja, partisipasi aktif perempuan pada kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta partisipasi aktif perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Berdasarkan rumusan BPS tersebut maka capaian komponen Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Komponen IDG Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Komponen IDG	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Keterlibatan di Parlemen	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11
Sumbangan Pendapatan	40.70	40.73	40.97	41.70	41.70
Tenaga profesional	45.97	48.14	48.58	54.53	54.53

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Keberhasilan peningkatan nilai IDG Kabupaten Boyolali diperoleh melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan;
Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2023 sebesar 66.99, sementara tahun 2022 sebesar 66.34, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0.65. Upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dilaksanakan melalui peningkatan pengarutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan akses perempuan dalam dunia politik, dan peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, dengan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang diarahkan pada koordinasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender, sosialisasi dan pelatihan personil pada perangkat daerah dalam penyusunan PPRG untuk ARG, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang swasta, politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- 2) Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan
Angka kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 22 kasus, sementara tahun 2022 sebesar 24 kasus, sehingga tahun 2023 ini mengalami penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2 kasus. Hal tersebut memberi pengaruh positif terhadap upaya peningkatan keberdayaan perempuan yang berdampak pada peningkatan indeks pemberdayaan gender. Upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan melalui peningkatan perlindungan terhadap perempuan, dengan program perlindungan perempuan, yang diarahkan pada pelaksanaan sosialisasi program pencegahan kekerasan, pelayanan bagi korban kekerasan, dan peningkatan kapasitas penyedia layanan perlindungan perempuan.
- 3) Meningkatkan status kabupaten layak anak;
Status Kabupaten layak anak tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan indeks pemberdayaan perempuan. Status kabupaten layak anak tahun 2023 adalah Nindya, meningkat dari tahun 2022 dengan status Madya. Dengan peningkatan status tersebut maka pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Boyolali sudah lebih baik, sehingga perempuan dalam hal ini adalah ibu menjadi lebih tenang dan fokus melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang ibu maupun sebagai pekerja/pegawai. Upaya meningkatkan status kabupaten layak anak dari Madya menuju Nindya dilaksanakan melalui peningkatan pemenuhan hak anak, dan peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dengan program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah maupun dunia usaha, koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak, pendampingan pencegahan kekerasan anak, dan mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

2. Angka PMKS

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Angka PMKS tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 112.96% dari perkiraan PMKS sebesar 61.029 terealisasi sebesar 53.122.

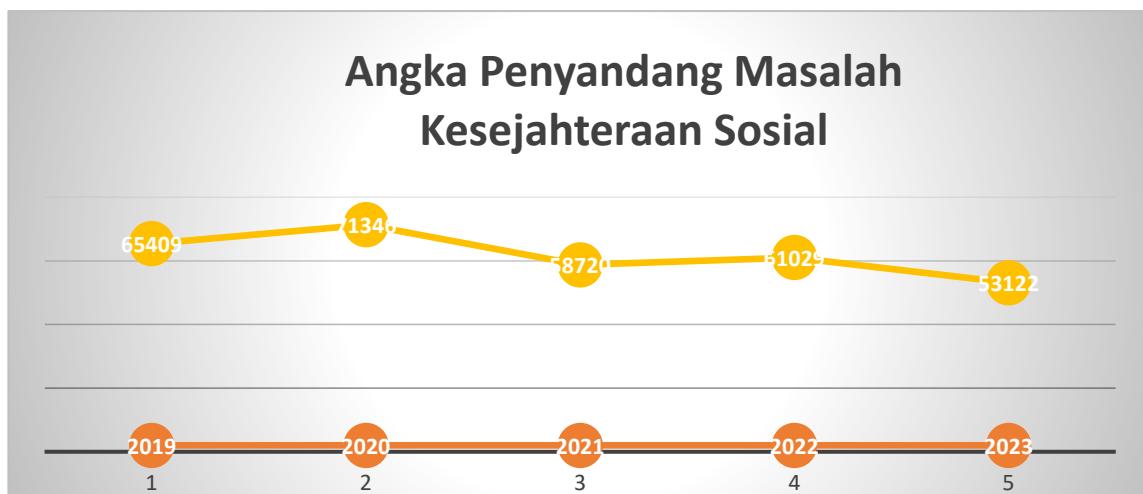
Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 12%, dimana Angka PMKS tahun 2022 tercatat sebesar 61.029.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 66.153, maka upaya menurunkan Angka PMKS di Boyolali telah melampaui target tersebut. Target akhir RPJMD akan diubah secara bertahap setiap tahunnya dalam Perjanjian Kinerja.

Angka PMKS Boyolali tidak dapat disandingkan dengan angka PMKS secara nasional karena perbedaan jumlah penduduk dan kemampuan perekonomian yang berbeda antar wilayah di Indoneisa.

Angka PMKS di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada grafik:

Grafik 3.7 Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017 - 2023



Unsur yang paling berperan dalam menurunkan angka PMKS adalah dengan meningkatkan kesejahteraan PMKS yang ditandai dengan peningkatan keberdayaan PMKS. Peningkatan keberdayaan PMKS tersebut di Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi PMKS, peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan non alam, dengan program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, yang diarahkan pada penyediaan makanan dan pakaian serta pemberian bimbingan sosial dan pelatihan bagi PMKS, penyediaan makanan dan pakaian serta pelaksanaan rehabilitasi sosial di rumah singgah, pemberian bantuan kebutuhan pokok, bantuan alat, pembinaan dan pelatihan bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), pemberian bantuan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, penyediaan makan, pakaian, dan layanan psikologi bagi korban bencana, peningkatan kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna dan Penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Upaya penanganan PMKS juga dilaksanakan secara bersama-sama lintas Instansi melalui Tim Tanggap Bencana yang diketuai oleh Bupati Boyolali dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah tertentu, Direktur RSUD, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Polisi Sektor, dan Kepala Baznas. Tim Tanggap sosial tersebut bertugas merumuskan kebijakan, menentukan mekanisme koordinasi, menyusun program kerja PMKS dan melaksanakan program kerja tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Tim tersebut juga melaksanakan penanganan secara cepat terhadap peristiwa yang terjadi baik berupa penanganan bencana, pemberian bantuan, dan penanganan kedaruratan.

3. Indeks Desa Membangun

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks desa membangun tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 102% dari target sebesar 0.7361 terealisasi sebesar 0.7505.

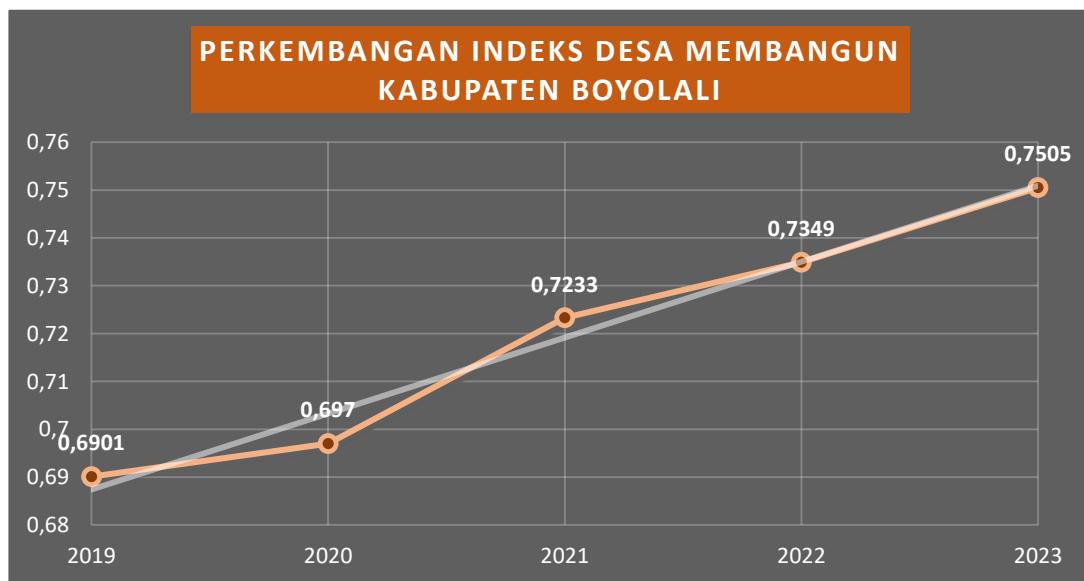
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0.0156 poin atau 2%, dimana Indeks desa membangun tahun 2022 tercatat sebesar 0.7349

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 0.7553, maka upaya meningkatkan Indeks desa membangun di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 91.77% dari data awal tahun 2020 sebesar 0.7233.

Sedangkan jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks desa membangun secara nasional maka Kabupaten Boyolali masih lebih baik yaitu sebesar 0.057 poin atau sebesar 8%, dimana rata-rata secara nasional sebesar 0.6935

Indeks desa membangun di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8 Perkembangan Indeks Desa Membangun 2019-2023



Unsur yang paling berperan dalam upaya peningkatan indeks desa membangun adalah dengan meningkatkan keberdayaan desa yang ditandai dengan kenaikan status desa baik dari berkembang menuju maju, atau dari maju menuju mandiri. Di Kabupaten Boyolali terdapat 261 Desa dengan status desa berkembang sebanyak 64 desa, desa maju sebanyak 169 desa dan desa mandiri sebanyak 28 desa. Desa yang mengalami kenaikan status desa dari berkembang menjadi maju sebanyak 33 Desa dan dari maju menjadi mandiri sebanyak 6 Desa, sedangkan untuk desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ditemukan lagi di Kabupaten Boyolali.

Peningkatan keberdayaan sosial dengan capaian kinerja sebesar 100.33%, 113.16% dan 100.77%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp8.946.709.335,00 dan realisasi sebesar Rp8.607.731.280,00 dengan capaian sebesar 96,21%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 3.79%. Peningkatan keberdayaan sosial didukung dengan 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Perempuan;
2. Program pemenuhan hak anak;
3. Program Perlindungan Khusus Anak;
4. Program Pemberdayaan Sosial;
5. Program Rehabilitasi Sosial;
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
7. Program Penanganan Bencana;
8. Program pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi			Capaian 2023
		2021	2022	2023	
Nilai Tukar Petani	107.64	102.76	107.27	117.11	108.8%

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 6

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Nilai Tukar Petani	109.8	117.11	334%	117.76	-0.65

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian nilai tukar petani akhir tahun 2023 sebesar 109.2% dari target sebesar 107.67 terealisasi sebesar 117.11

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 9.84 angka, dimana nilai tukar petani tahun 2022 tercatat sebesar 107.27.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka capaian tersebut telah melampaui target akhir RPJMD. Target akhir RPJMD akan diubah secara periodik setiap tahun dalam dokumen perjanjian kinerja atau perjanjian kinerja perubahan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai tukar petani secara nasional maka Kabupaten Boyolali tertinggal sebesar 0.65 angka, dimana Nilai Tukar Petani secara nasional sebesar 117.76

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9 Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali 2019- 2023



Nilai tukar petani (NTP) menggambarkan tingkat daya tukar/daya beli petani terhadap produk yang dibeli/bayar petani yaitu produk/barang konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi nilai tular petani semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi tersebut dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera. Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh BPS, maka NTP didefinisikan sebagai rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar petani. Sejak tahun 20 Capaian kedua komponen NTP Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Capaian Komponen Nilai Tukar Petani Kabupaten Boyolali

Komponen NTP	Capaian				
	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023
Indeks diterima Petani	146.2	108.94	113.96	125.53	141.86
Indeks dibayar Petani	137.92	107.34	110.45	117.02	121.13

Peningkatan nilai tukar petani sebagai indikator dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Boyolali dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Percentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2023 sebesar 1,47%, sementara tahun 2022 sebesar 1.29%, sehingga tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 0.18 poin. Upaya peningkatan PDRB sektor pertanian tersebut dilaksanakan melalui peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi sub sektor peternakan dan perikanan, dengan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penyediaan dan penegmbangan prasarana peternakan, perizinan usaha pertanian, yang diarahkan pada pengendalian alih lahan pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air, peningkatan

irigasi permukaan, pembangunan dan pemeliharaan bendungan, pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan dan pemeliharaan pintu air, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan irigasi air tanah dalam dan dangkal, pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok tani, penggunaan benih yang bersertifikat, peningkatan produksi hasil pertanian, pemberian bantuan benih, dan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, fasilitasi bantuan sarana prasarana budi daya, pengembangan kapasitas pembudidaya ikan, pendampingan bagi nelayan kecil, fasilitasi bantuan pembiayaan dan asuransi usaha perikanan, pemberian bimbingan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, pelayanan pengobatan ternak, penanganan dan pemberian bantuan ternak yang terkena penyakit menular, pemberian vaksin kepada ternak, pelayanan jasa laboratorium guna pemeriksaan sampel penyakit hewan, fasilitasi pemotongan hewan (sapi), pemberian bantuan peralatan pengolahan pakan ternak, pelatihan peningkatan mutu produk peternakan, fasilitasi pengujian mutu pakan, fasilitasi izin usaha pemeliharaan hewan.

2. Meningkatkan kualitas susu

Boyolali merupakan salah satu kota penghasil susu terbesar di Jawa Tengah. Produksi susu tahun 2023 mencapai 37.804.724 liter. Produksi susu tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani jika susu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang memenuhi syarat bagi perusahaan susu lokal maupun nasional, sehingga petani tidak kesulitan dalam pemasaran produk karena sudah dapat ditampung oleh perusahaan tertentu. Pada tahun 2023 tercatat sejumlah 5 perusahaan yang menerima produk susu boyolali. Semakin banyak perusahaan yang menerima produk susu dari petani/peternak, menunjukkan kualitas susu yang dihasilkan semakin baik dan memenuhi standart dari perusahaan. Upaya untuk peningkatan kualitas susu dilaksanakan melalui pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan dengan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang diarahkan pada pendampingan unit usaha produk hewan khususnya susu dan pelaksanaan pameran atau festival susu.

3. Meningkatkan agro industri susu

Susu sapi merupakan salah satu produk yang tidak tahan lama, sehingga diperlukan adanya kreativitas untuk pengolahan dalam bentuk produk lain sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan menghindari adanya kerugian bagi petani atau pengusaha kecil. Meningkatnya agro industri susu yang ditandai dengan persentase peningkatan pendapatan sektor industri susu terealisasi sebesar 2.52%. Pendapatan agro industri susu tahun 2022 sebesar Rp857.160.000,00 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp2.160.000.000,00, sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp1.302.840.000,00. Upaya peningkatan agro industri susu dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan pengembangan industri susu dengan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri serta perencanaan dan pembangunan industri yang mengarah pada peningkatan produksi susu dan promosi produk olahan susu.

4. Meningkatkan ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023 sebesar 87.31, sementara tahun 2022 sebesar 85.26, sehingga tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 2.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang ditandai dengan adanya ketersediaan, keterjangkauan serta stabilitas harga dan pangan. Upaya peningkatan indeks ketahanan pangan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan pangan,

peningkatan akses distribusi pangan, peningkatan keamanan dan pengawasan pangan, peningkatan pemanfaatan pangan yang bervariasi, dengan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, yang mengarah pada penyediaan cadangan pangan, pembangunan lumbung pangan, pembinaan kelompok lumbung pangan, penyediaan informasi harga pangan, pemantauan stok dan pasokan pangan, pengembangan jaringan distribusi pangan, penyusunan dan pemutakhiran peta kerawanan dan kerentanan pangan, pengawasan pangan segar, pelatihan pengolahan pangan lokal, pemberian bantuan bibit dan sarana tanam pekarangan lestari, pembinaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya tenaga kerja yang menangani pertanian, karena sebagian besar tenaga pertanian adalah generasi tua, sehingga semakin hari berkurang akibat usia dan tenaga yang sudah tidak memungkinkan, Atas hambatan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pertanian menggandeng generasi muda dengan mendata terlebih dahulu jumlah petani milenial, selanjutnya memberikan sosialisasi dan pelatihan khusus bagi pemuda untuk pemanfaatan, pengolahan, dan pengembangan lahan pertanian.
2. Akibat maraknya makanan instan yang beredar menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pentingnya pangan lokal, atas kendala tersebut, maka dilakukan sosialisasi pangan B2SA dan promosi pangan lokal bagi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan petani dengan capaian kinerja sebesar 100,1%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp47.662.361.700,00 dan realisasi sebesar Rp46.123.588.491,00 dengan capaian 96,77%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,23%. Adapun upaya pencapaian target tujuan keenam tersebut didukung dengan 15 (lima belas) program, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
8. Program Perizinan Usaha Pertanian;
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
10. Program Penyuluhan Pertanian;
11. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
13. Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
14. Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
15. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat

teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 7 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja Tujuan 7

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi 2022	Capaian
Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	823	893	108.51%

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 7

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	903	893	94.2%	-	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 sebesar 108.51% dari target sebesar 823 terealisasi sebesar 893. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah di Boyolali telah mengalami pergerakan sebesar 94.2% dari data awal tahun 2020 sebesar 763.

Sedangkan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tidak dapat disandingkan karena Kementerian Dalam Negeri tidak mempublikasikan angka indeks penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan, melainkan Pemerintah Daerah menghitung sendiri angka tersebut dengan formulasi yang telah ditetapkan melalui aplikasi simona sebagai dasar penghitungan besaran maksimal Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/13218/SJ tanggal 27 November 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10 Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2020- 2023



Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/13218/SJ tanggal 27 November 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa komponen Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit sebesar 90% dan variabel hasil sebesar 10%. Adapun variabel pengungkit terdiri dari 7 (tujuh) variabel yaitu:

1. Opini laporan keuangan;
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
3. Kematangan penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Sedangkan variabel hasil meliputi 2 (dua) variabel yaitu: Indeks pembangunan manusia dan indeks gini ratio.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka capaian variabel Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Capaian Variabel IPPD Kabupaten Boyolali

Variabel IPPD	Realisasi			
	2020	2021	2022	2023
Opini laporan keuangan;	WTP	WTP	WTP	WTP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);	3.46	-	2.81	3.40
Kematangan penataan Perangkat Daerah;	33.62	36.6	37.23	37.3

Indeks Inovasi Daerah;	5660	48.99	5742	78.51
Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;	1.1	1.2	1.3	1.3
Rasio belanja Perjalanan Dinas; dan	2	1	1.9	2.5
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	61.72	63.60	68.76	76.94
Indeks pembangunan manusia	74.25	74.4	74.97	75.41
indeks gini ratio	0.359	0.368	0.366	0.369

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
 - 1) Opini BPK
Opini BPK tahun 2023 adalah WTP sebagaimana target yang ditetapkan yaitu WTP. Kabupaten Boyolali telah meraih opini WTP selama dua belas tahun berturut-turut, sejak tahun 2012. Upaya mendapatkan Opini WTP tersebut dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah serta penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah, dengan program pengelolaan barang milik Daerah dan penyelenggaraan pengawasan, yang diarahkan pada penataan, inventarisasi, pengamanan dan penilaian barang milik Daerah, optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, pengawasan dan review kinerja dan keuangan daerah, keungan desa, monev tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
 - 2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 sebesar 69.55, mengalami peningkatan sebesar 3.01 dari tahun 2022. Upaya peningkatan IPKD dilaksanakan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dengan program pengelolaan pendapatan Daerah, yang diarahkan pada pengelolaan pendapatan Daerah, penggalian potensi pajak Daerah, serta pemberian kemudahan bagi pembayar pajak melalui sipad.boyolali.go.id, disamping itu adanya pemasangan *tapping box* di sejumlah restoran, hotel dan tempat karaoke dan taman wisata, guna memudahkan pemantauan dan pengawasan bagi wajib pajak, sehingga meminimalisir penyelewengan pajak, kemudahan pembayaran pajak juga dilakukan melalui aplikasi sipad.go.id, yang menampilkan tagihan pajak dan pembayaran pajak secara *online*.
Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah dan akan berpengaruh pula pada skor opini BPK yang memberi kontribusi sebesar 10% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan integritas dan kapasitas pemerintah daerah
Peningkatan integritas dan kapasitas pemerintah daerah ditandai dengan 2 (dua) indikator yaitu:
 - 1) Indeks profesionalitas Pegawai
Indeks Profesionalitas Pegawai tahun 2023 sebesar 75.8, meningkat cukup tinggi dari tahun 2022 yaitu sebesar 28.8. Upaya peningkatan indeks profesionalitas pegawai dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas penerapan sistem merit dalam birokrasi, dengan program kepegawaian daerah dan program pengembangan SDM, yang diarahkan pada perencanaan

dan pengadaan SDM, peningkatan kualitas SDM melalui bintek dan diklat, penilaian kinerja pegawai, pemberian *reward* dan *punishman* kepada ASN dan pelayanan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Nilai survey penilaian integritas

Tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengeluarkan angka hasil survei penilaian integritas untuk Kabupaten Boyolali, dengan penjelasan diduga terdapat kecurangan berupa arahan untuk menjawab pertanyaan dalam kuisioner survei penilaian integritas, sehingga angka yang ditampilkan disini adalah angka tahun 2022, yaitu 88.33. Upaya peningkatan hasil survei penilaian integritas dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah, dengan program penyelenggaraan pengawasan aerah, dan program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi, yang diarahkan pada melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu, koordinasi dengan pihak terkait dalam monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi, melakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi.

Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan integritas dan kapasitas pemerintah daerah dan akan berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandai dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 68.28, mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 3.16 dari tahun 2022. Upaya peningkatan nilai SAKIP dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, peningkatan kualitas perencanaan daerah dan pembangunan kelembagaan berbasis kinerja, dengan program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Statistik sektoral dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang diarahkan pada Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diawali dengan pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyediaan data statistik sektoral, penyusunan laporan kinerja, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang menjadi bagian dari kinerja utama setiap Perangkat Daerah.

2) Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks RB tahun 2023 sebesar 76.94 meningkat sebesar 8.18 dari tahun 2022. Upaya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui perubahan dokumen perencanaan dan pelaksanaan *roadmap* Reformasi Birokrasi yang meliputi variabel general dan tematik, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 Variabel general meliputi berbagai perangkat terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, sistem dan regulasi dalam pemerintahan serta budaya dan sumber daya manusia sedangkan variabel tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi Pemerintahan serta percepatan prioritas aktual Presiden.

- 3) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Nilai EKPPD tahun 2023 sebesar 3.40, mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0.59. Upaya peningkatan nilai EKPPD dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah, peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintah Desa, dan peningkatan peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, penataan Desa, pengembangan penelitian dan pengembangan daerah, yang diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, penataan administrasi Pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, fasilitasi dan koordinasi hukum, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, fasilitasi tata wilayah Desa dan fasilitasi sarana dan prasarana Desa, pelaksanaan riset pada berbagai bidang yang diperlukan, penjaringan inovasi masyarakat dan Perangkat Daerah, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.

Ketiga indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akan berpengaruh pula pada skor indeks Reformasi Birokrasi dan skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang masing-masing memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan *smart governance* Boyolali

Pengembangan *smart governance* Boyolali ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1) Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3.65, mengalami kenaikan sebesar 0.83 dari tahun 2021. Upaya peningkatan Indeks SPBE dilaksanakan melalui penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu dan penguatan kualitas keamanan dan informasi Daerah, dengan program aplikasi informasi, dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yang diarahkan pada fasilitasi pembuatan dan pemeliharaan aplikasi, penyediaan dan pemeliharaan jaringan, pemantauan pemanfaatan domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan, serta pengamanan informasi Pemerintahan.

2) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 sebesar 85.79, mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2022 sebesar 11.36. Upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan informasi publik, dengan program informasi dan komunikasi publik, yang diarahkan pada pemberian informasi perkembangan Kabupaten Boyolali, kepada masyarakat melalui media yang telah disediakan secara online pada website boyolali.go.id.

Kedua indikator diatas memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan *smart governance* dan akan berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 84.35, meningkat dari tahun 2022 sebesar 0.91. Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator yang berpengaruh pada skor indeks Reformasi Birokrasi yang memberi kontribusi sebesar 30% terhadap Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan kepuasan

masyarakat dilaksanakan melalui penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas petugas pelayanan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pengelolaan profil kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan Pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, yang diarahkan pada pembinaan, penyelenggaraan pelayanan publik, monitoring dan evaluasi pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, dan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya lain yang dilakukan dalam mempercepat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu dengan pembangunan satu data Boyolali melalui *Monitoring Center For Development* (MCD) Boyolali, guna mendapatkan data yang *valid* dan *update*. Selain itu juga dilakukan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dari Tim yang terdiri dari Auditor yang bertugas mendampingi Perangkat Daerah dalam percepatan pencapaian target kinerja.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan kategori dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), sehingga memberi dampak pada capaian nilai IPPD. Atas perubahan tersebut maka dalam perhitungan IPPD pada nilai EKPPD tetap memakai kategori pada aturan sebelumnya;
2. Keterbatasan pengetahuan Perangkat Desa tentang tugas pokok fungsinya dan administrasi Desa, atas hambatan tersebut maka dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi perangkat Desa terkait tugas pokok dan peraturan baru yang harus diikuti dalam penyusunan administrasi Desa;
3. Masih terdapat beberapa indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang belum dilakukan penilaian oleh Kementerian atau lembaga, sehingga nilai pada indikator dimaksud tidak ada atau nol.

Terwujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dengan capaian kinerja sebesar 105.37%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp134.584.799.278,00 dan realisasi sebesar Rp125.781.935.056,00 dengan capaian 93,46%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 6.34%. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui 26 (dua puluh enam) program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip;
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Kepegawaian Daerah;
5. Program Pengembangan SDM;
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan Daerah;
7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Asistensi;
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
9. Program Perekononomian dan Pembangunan;
10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
11. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;

16. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
17. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
18. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
19. Program Pendaftaran Penduduk;
20. Program Pencatatan Sipil;
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
22. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
24. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
25. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
26. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

TUJUAN 8 : Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali

Tabel 3.22 Pencapaian Kinerja Tujuan 8

Indikator kinerja utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Indeks kualitas lingkungan hidup	66.54	61.39	92.26%
Indeks smart city	3.2	3.3	103.13%

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan 8

Indikator kinerja utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi 2023	Progres	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks kualitas lingkungan hidup	66.71	61.39	18.65%	72.54	-11.15
Indeks smart city	3.28	3.3	105.41%	3.84 (Kota Surakarta)	Angka tertinggi Kabupaten/Kota

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 sebesar 92.26% dari target sebesar 66.54 terealisasi sebesar 61.39%

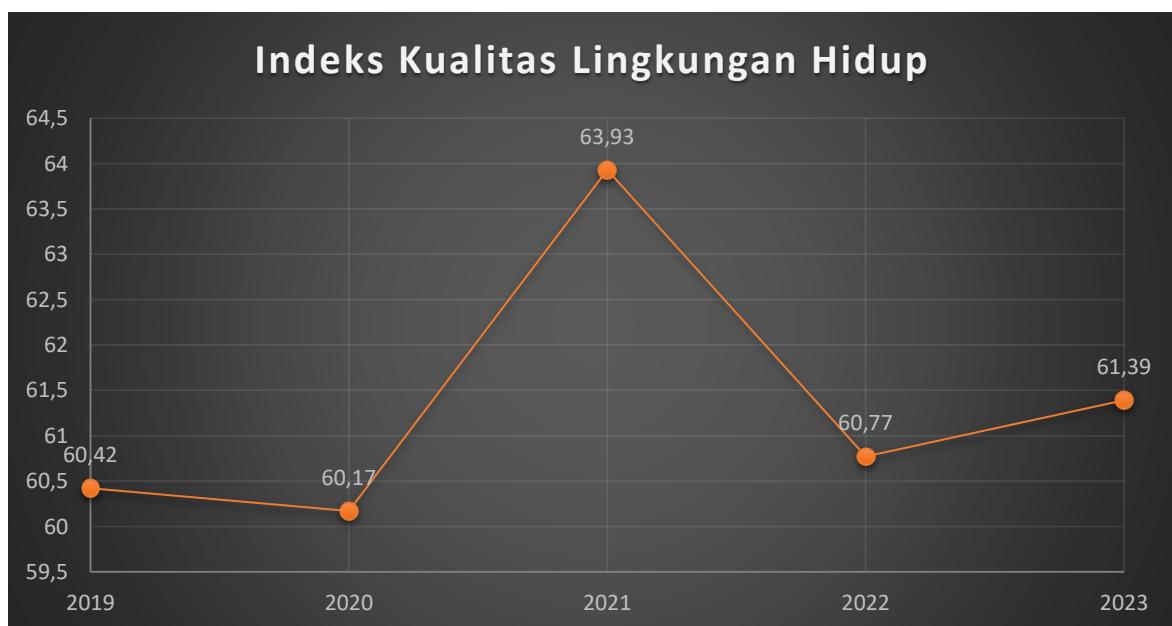
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0.62, dimana indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 tercatat sebesar 60.77.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Boyolali telah pergerakan sebesar 18.65% dari data awal tahun 2020 sebesar 60.17.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup secara nasional, Kabupaten Boyolali tertinggal cukup jauh yaitu sebesar 11.15, dimana realisasi nasional sebesar 72.54.

Perkembangan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019 - 2023



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup merupakan perpaduan antara konsep indeks kualitas lingkungan dan konsep *environmental performance indeks*. IKLH digunakan sebagai komponen penilaian kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen dalam perhitungan IKLH meliputi: Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Adapun capaian komponen IKLH Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Capaian Komponen Perhitungan IKLH Kabupaten Boyolali

Komponen IKLH	Capaian			
	2020	2021	2022	2023
Indeks kualitas air	58.57	52.5	48.42	50.00
Indeks kualitas udara	87.35	88.17	84.18	82.55
Indeks kualitas tutupan lahan	40.99	38.71	38.71	41.82

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

-
- 1) Meningkatnya kualitas air
Peningkatan kualitas air ditandai dengan indeks kualitas air. *National Sanitation Foundation Water Quality Index* (NSF-WQI) atau Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Indeks kualitas air ini didasarkan pada 9 parameters yang mencakup: *BOD, DO, nitrate, total phosphate, temperature, turbidity, total solids, pH, and Fecal Coliform*. Indeks kualitas air tahun 2023 sebesar 50, mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2022 yaitu sebesar 31.58. Upaya peningkatan kualitas air dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran limbah dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) beserta limbah B3, perencanaan lingkungan hidup dan penanganan pengaduan lingkungan hidup, yang diarahkan pada pembinaan pengelolaan air limbah, pembangunan dan pemanfaatan IPAL Biogas, pembangunan sumur resapan, penghijauan, fasilitasi rekomendasi izin penyimpanan sementara LB3, penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penanganan pengaduan lingkungan hidup, dan pengujian dan pemantauan kualitas air.
 - 2) Meningkatnya kualitas udara
Peningkatan kualitas udara ditandai dengan indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 82.55, mengalami penurunan sebesar 1.63 dari tahun 2022. Upaya peningkatan kualitas udara dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran udara dengan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang diarahkan pada pembinaan pengelolaan kualitas udara kepada dunia usaha dan pembinaan serta fasilitasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi volume gas rumah kaca.
 - 3) Meningkatnya kualitas tutupan lahan
Peningkatan kualitas tutupan lahan ditandai dengan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan tahun 2023 sebesar 41.82, mengalami peningkatan sebesar 3.11 dari tahun 2022. Peningkatan kualitas tutupan lahan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati yang diarahkan pada pengelolaan kebun raya indrokilo, pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
 - 4) Meningkatnya penanganan/ pengelolaan sampah
Penanganan/pengelolaan sampah menjadi hal penting dalam kelestarian alam yang berpengaruh pada kualitas air, udara dan tutupan lahan. Persentase sampah yang tertangani/ terkelola tahun 2023 sebesar 58.61%, mengalami kenaikan sebesar 2.05 dari tahun 2022. Peningkatan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui optimalisasi pengelolaan sampah dengan program Pengelolaan persampahan yang diarahkan pada penyediaan sarana prasarana tempat pembuangan sampah akhir, pengelolaan 3R, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Indeks *Smart City*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indeks *smart city* tahun 2023 sebesar 103.13% dari target sebesar 3.2 terealisasi sebesar 3.3

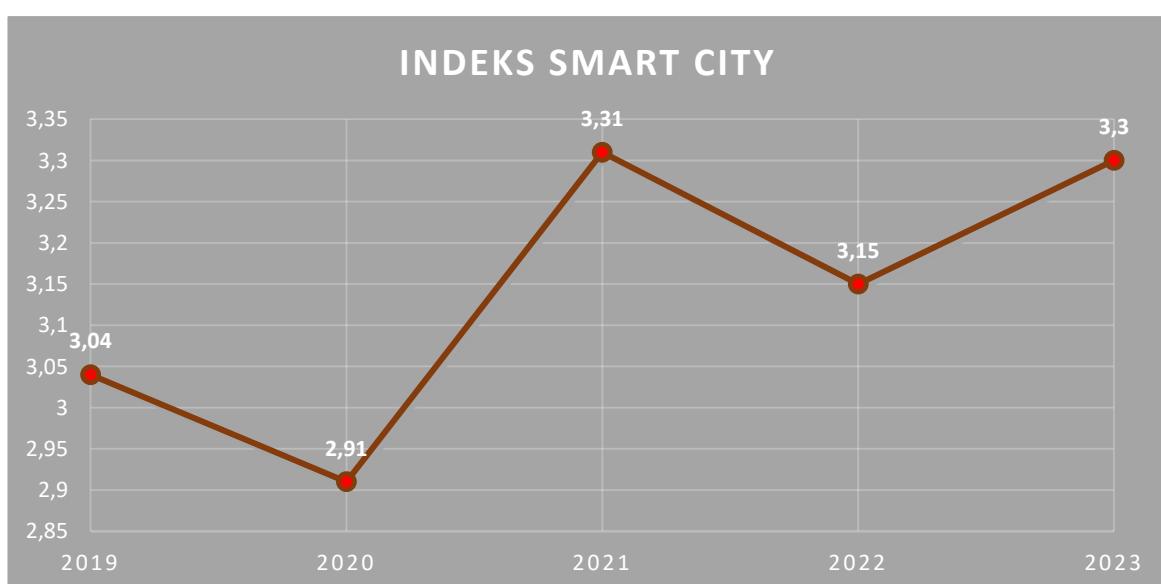
Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 0.15, dimana indeks *smart city* tahun 2022 tercatat sebesar 3.15

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka upaya meningkatkan indeks *smart city* di Boyolali telah melampaui target akhir RPJMD. Target akhir RPJMD akan diperbaiki secara berkala melalui Perjanjian Kinerja atau perjanjian Kinerja perubahan setiap tahunnya.

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks *smart city* tertinggi Kabupaten/Kota secara nasional maka masih tertinggal sebesar 0.54, dimana indeks *smart city* tertinggi yaitu Kota Surakarta dengan angka 3.84.

Indeks *smart city* di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.12 Indeks Smart City Tahun 2019-2023



Menurut pendapat dari Pakar dari Institut Teknologi Bandung Suhono S.Supangat, kota cerdas (*smart city*) adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warganya. Konsep *smart city* terdiri dari komponen-komponen pendukung yaitu: *smart economy*, *smart people*, *smart governance*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart living*. Penilaian indeks *smart city* meliputi penilaian yang dimulai dari *baseline*, *output*, *outcome*, *quickwin* dan kolaborasi.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Indeks *smart city* adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pemukiman berbasis *smartness* dilihat dengan 4 (empat) indikator yaitu:
 - (1) Persentase layanan publik dan pengaduan *online* yang aktif
Penyediaan layanan publik dan pengaduan online yang aktif tahun 2023 dengan capaian 100%, capaian tersebut senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan guna mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui media sosial yang tersedia serta kanal pengaduan lain yang dipantau dan dikelola dengan baik. Penyediaan layanan publik dan pengaduan *online* dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan aplikasi layanan publik, dengan program aplikasi informatika, yang diarahkan pada fasilitasi pembuatan aplikasi pelayanan publik.

-
- (2) Luas kawasan kumuh
- Luas kawasan kumuh tahun 2023 terealisasi sebesar 31.72 ha, berkurang dari tahun 2022 yaitu sebesar 32.47 ha. Pengurangan luasan kawasan kumuh dilaksanakan melalui optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, dengan program kawasan permukiman, yang diarahkan pada kemudahan fasilitasi penerbitan izin perumahan, penyusunan peta perumahan dan kawasan permukiman, survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh, peningkatan kualitas kawasan kumuh, penanganan kawasan kumuh, dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (3) kemudahan akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2023 terealisasi sebesar 94.11%, meningkat sebesar 2.33 dari tahun 2022. Upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dilaksanakan melalui peningkatan akses air bersih, melalui program pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, yang diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pembangunan sumur air tanah, tanggul sungai, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA, pembangunan dan pemeliharaan jaringan perpipaan untuk air minum.
- (4) kemudahan akses terhadap sanitasi yang layak dan berkelanjutan tahun 2023 sebesar 98,3%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 0.02. Upaya peningkatan akses terhadap sanitasi yang layak dilaksanakan melalui pengembangan sanitasi individual dan komunal, dengan program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, yang diarahkan pada sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik.
- 2) Meningkatkan akses rumah layak huni
- Peningkatan akses rumah layak huni ditandai dengan cakupan rumah layak huni tahun 2023 sebesar 91.6%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 1.85. Peningkatan akses rumah layak huni dilaksanakan melalui penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terdampak relokasi, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dengan program kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, yang diarahkan pada identifikasi data rumah korban bencana dan rumah yang terkena relokasi, rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana, pelayanan penerbitan izin perumahan, penyusunan peta perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Upaya peningkatan rumah tidak layak huni juga dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Desa dan Baznas.
- 3) Meningkatkan kualitas bangunan dan penataan ruang ditandai dengan 2 (dua) indikator) yaitu:
- (1) Persentase bangunan yang sesuai standart tahun 2023 sebesar 94.23%. menurun dari tahun sebelumnya sebesar 100%. Upaya peningkatan bangunan sesuai standart dilaksanakan melalui pemeliharaan dan rehabilitasi gedung fasilitas publik yang memadai, optimalisasi layanan jasa konstruksi, optimalisasi penyelesaian konflik pertanahan, dengan program penataan bangunan dan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, pengembangan jasa konstruksi, dan penyeleiaian sengketa tanah garapan, yang diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan gedung fasilitas publik, penerbitan rekomendasi PBG, penataan lingkungan dan gedung

kantor, peningkatan kualitas tenaga terampil konstruksi, pelayanan penerbitan SIUJK, dan mediasi penyelesaian sengketa tanah.

- (2) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2023 sebesar 96.81%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6.01. Upaya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dengan program penyelenggaraan penataan ruang, yang mengarah pada penyusunan rencana detail tata ruang, pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan pelayanan pemberian rekomendasi pemanfaatan tata ruang.

Adapun kendala atau permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kenyamanan hidup di Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Adanya tren penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) secara Global, terutama wilayah Solo Raya. Hipotesis menunjukkan bahwa terdapat suatu kondisi tertentu, yang terjadi di dalam cakupan wilayah yang luas, yang mengakibatkan penurunan indeks kualitas air di berbagai wilayah, yang sampai saat ini belum dapat disimpulkan faktor utama yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Atas permasalahan tersebut maka dilaksanakan suatu tindakan preventif dan proaktif guna meminimalisir dampak yang disebabkan baik yang berasal dari alam maupun dari manusia.
2. Laju pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau yang tidak dapat megimbangi area yang terpapar polusi udara. Salah satu faktor penyebab meningkatnya polusi udara adalah bidang transportasi. Semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak terhadap semakin buruknya kualitas udara yang dihasilkan. Atas permasalahan tersebut maka dilaksanakan upaya untuk meningkatkan jumlah tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi seperti area industri dan transportasi, mengingat salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penyerap debu dan bahan partikel lain (PM10 dan PM 2,5)
3. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Atas permasalahan tersebut maka dilaksanakan pembinaan maupun sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang pentingnya memilah sampah, diawali dengan memilah sampah yang berasal dari sumbernya dengan berbasis 3R
4. Kondisi geografis pada sebagian wilayah Kabupaten Boyolali yang kering dan poros, menyebabkan adanya kendala dalam pencarian sumber air yang memenuhi syarat. Atas permasalahan tersebut maka setahun sebelumnya telah dilakukan studi geolistrik yang merupakan metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan dibawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik kedalam tanah, sehingga dapat memberikan informasi data dibawah permukaan tanah yang menyangkut struktur geologinya, sebagai dasar penentuan pelaksanaan pemboran.
5. Peningkatan akses rumah layak huni terkendala dengan kemampuan atau keterbatasan masyarakat dalam berswadaya. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat serta pembiayaannya bekerjasama dengan bank dengan suku bunga rendah, sehingga masyarakat bisa membayar dengan cara kredit.
6. Masih adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Atas permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang rencana tata

ruang Daerah, agar masyarakat lebih memahami pemanfaatan tanah sesuai ketentuan.

Peningkatan kenyamanan hidup di Kabupaten Boyolali dengan capaian kinerja sebesar 91,4% dan 103,96 %, dengan rata-rata capaian sebesar 97,68%, didukung dengan penganggaran sebesar Rp101.118.547,00 dan realisasi Rp97.121.950.537,00 dengan capaian sebesar 96,05%, sehingga tidak terdapat efisiensi. Adapun upaya pencapaian target kinerja tujuan kedelapan ini dilaksanakan melalui 16 (enam belas) program, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Penataan Bangunan Gedung;
4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
8. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
11. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
12. Program Pengelolaan Persampahan;
13. Program Pengembangan Perumahan;
14. Program Kawasan Permukiman;
15. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
16. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka dilakukan koordinasi lintas perangkat Daerah dan lintas instansi dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja yang ditetapkan.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 untuk belanja sebesar Rp2.585.754.134.000,00, dan dana tersebut digunakan sebesar Rp2.435.264.639.802,00 atau 94,29%. Berikut perbandingan anggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dan Tahun 2023:

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023	
	ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)	ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)
1				
BELANJA	2.582.754.134	2.435.264.639,802	2.538.758.283.000	2.415.957.200.375
BELANJA OPERASI	1.602.319.666	1.483.735.365,638	1.642.240.257.400	1.541.344.967.214
▪ Belanja Pegawai	965.288.716	925.391.001,017	961.195.127.000	914.044.381.109
▪ Belanja Barang dan Jasa	535.964.436	497.672.242,121	568.352.110.400	533.563.259.960
▪ Belanja Hibah	70.748.980	30.677.780,074	75.084.855.000	56.503.583.645
▪ Belanja Bantuan Sosial	30.317.534	29.994.342,426	37.608.165.000	37.233.742.500
BELANJA MODAL	592.356.350	566.990.872,13	471.694.238.600	453.924.865.491
▪ Belanja Modal Tanah	8.026.831	6.776.019,956	4.220.000.000	3.438.098.494
▪ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.600.863	159.474.481,565	116.917.410.000	111.153.641.092
▪ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.157.808	171.072.270,699	187.257.424.000	182.322.750.909
▪ Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi	225.803.608	220.129.933,908	153.271.264.000	147.107.737.578
▪ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.767.240	9.538.166,002	9.835.140.600	9.731.632.918
▪ Belanja Modal Aset Lainnya			193.000.000	171.004.500
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.076.474	6.885.016,034	15.383.500.000	13.324.273.670
BELANJA TRANSFER	379.001.644	377.653.386	409.440.287.000	407.363.094.000
▪ Belanja Bagi hasil	17.052.111	14.704.056	20.641.349.000	18.564.156.000
▪ Belanja Bantuan Keuangan	361.949.533	361.949.330	388.798.938.000	388.798.938.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, 2023 (Realisasi sebelum pemeriksaan BPK menuju audited)

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja tujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Per Tujuan Pembangunan Tahun 2023

NO	TUJUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	153.121.562.700	148.868.678.677	97%	103.30%	2.78%
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	3.031.250.000	2.965.381.188	98%	80.07	-
3	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	544.661.924.795	480.680.420.690	88%	99.5%	-

NO	TUJUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN (%)	CAPAIAN KINERJA	EFISI ENSI (%)
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya ketahanan sosial	19.638.029.000	19.445.349.195	99%	100.12%	1%
5	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	9.813.115.000	9.694.323.270	99%	105.4%	1%
6	Meningkatnya kesejahteraan petani	43.175.664.000	40.440.346.045	94%	108.8%	6%
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1.203.143.626.730	1.175.237.175.442	98%	108.51%	2%
8	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	113.557.803.000	110.497.726.207	97%	97.7%	-
TOTAL		Rp2.090.142.975.2 25	Rp1.987.829.700.7 14	95%	100.99%	5%

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Beberapa penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 yang merupakan apresiasi atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Kabupaten Terinovatif melalui *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2023;
2. Piagam Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan Predikat Sistem Merit Baik dan Kualitas Pengisian JPT Baik Tahun 2023;
3. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa piala Adipura;
4. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada RSUD Pandan Arang sebagai unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima;
5. Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara MPP dengan Predikat Sangat Baik;

-
6. Piagam Penghargaan dari Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Nomine Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintahan Daerah Peringkat 4 Nasional Tahun 2023;
 7. Piagam Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi Tahun 2023;
 8. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 12x bertutut-turut;
 9. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya;
 10. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kategori Madya dalam Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023;
 11. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak Kategori Madya Tahun 2023;
 12. Piagam Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Predikat Swasti Saba Wistra;
 13. Penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kabupaten yang telah menetapkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 14. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Best Practice* kepedulian Pemerintah Daerah dalam penanganan kesehatan jiwa dan bebas pasung;
 15. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah atas Pemetaan Daya Saing Daerah dengan Indeks Tinggi Tahun 2023;
 16. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Terbaik Kedua Tahun 2023, Kategori Kinerja Pengawasan;
 17. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Kabupaten Terbaik dalam pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
 17. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbaik II Kader Posyandu Berprestasi;

-
18. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbaik II Puskesmas ter"Germas";
 19. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Pratama, kepada:
 - a. Dukuh Tagung Cilik Desa Karanganyar Tamansari Boyolali; dan
 - b. Dukuh Tagung Gedhe desa Karanganyar Tamansari Boyolali.
 20. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya, kepada:
 - a. Dukuh Sidotopo Desa Cabeankunti Cepogo Boyolali;
 - b. Dukuh Sambungrejo Desa Mliwis Cepogo Boyolali;
 - c. RW 09 Desa Sukabumi cepogo Boyolali;
 - d. Dusun Wonopedut Desa Wonodoyo Cepogo Boyolali;
 - e. Dukuh Karangkendal Desa Karangkendal Tamansari Boyolali;
 - f. Desa Keposong Tamansari Boyolali;
 - g. Dukuh Tembelang Desa Lanjaran Tamansari Boyolali;
 - h. Dusun Turunan Desa Ringinlarik Musuk Boyolali;
 - i. Desa Senden Selo Boyolali;
 - j. Dukuh Pasah Desa Senden Selo Boyolali; dan
 - k. Dusun Gunung Desa Gunung Simo Boyolali.
 21. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Bidang Lingkungan Hidup Peringkat EMAS, kepada:
 - a. PT. Pertamina patraniaga TBBM Teras; dan
 - b. PT. Pertamina Patraniaga DPPU Adisumarmo.
 22. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Bidang Lingkungan Hidup BIRU kepada :
 - a. PT. So Good Food UHT;
 - b. PT. Delta Merlin Duniatex;
 - c. PT. Sariwarna Asli;
 - d. PT. Sriwahana Adityakarta Tbk; dan
 - e. PT Prima Sejati Sejahtera.
 23. Piagam Penghargaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kebun Raya Indrokilo sebagai Pengelola Kebun Raya Daerah Terbaik Tahun 2023
 24. Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Sekolah Adiwiyata Tahun 2023, kepada:
 - a. SMPN 1 Teras; dan
 - b. SMAN 1 Banyudono.

BAB IV PENUTUP

Hasil Pengukuran terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023, berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang terdiri dari 8 (delapan) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja secara keseluruhan adalah 100.99% (Seratus koma empat puluh delapan persen) dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian secara keseluruhan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan capaian kinerja lebih dari 90% (kategori sangat tinggi);

Capaian kinerja melampaui 100% tersebut didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung kinerja utama Pemerintah tahun 2023 melalui 119 program, sebesar Rp 1.229.387.300.000,00, terealisasi sebesar Rp 1.126.089.507.069,00 dengan capaian 95%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 5%.

Capaian kinerja diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berupaya dengan baik dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, sarana prasarana pendukung konektivitas antar wilayah sehingga memudahkan akses distribusi dan meningkatkan pemerataan perekonomian masyarakat. Selain itu pembangunan ikonik berupa pembangunan wisata religi diharapkan dapat mendukung pariwisata dan meningkatkan pendapatan Daerah. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kinerja dapat dilihat dari adanya peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, penurunan risiko bencana, penekanan angka konflik sosial, penurunan angka PMKS, peningkatan kualitas Desa, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan angka *smart city* Kabupaten Boyolali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 ini disusun agar dapat menjadi bahan pencermatan untuk perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya dan tahun-tahun mendatang, sehingga pembangunan terus berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali.

